

SOSIALISASI POLITIK

Suatu Pemahaman Awal

Haryanto



SOSIALISASI POLITIK

Suatu Pemahaman Awal

Haryanto



Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal

Hak cipta © Penerbit PolGov, 2018

All rights reserved

Penulis: **Haryanto**

Editor: **Hellatsani Mada**

Pemeriksa Aksara: **Cucuk Radhosa**

Desain Sampul: **Damar S. Sasodoto**

Tata Letak Isi: **M. Baihaqi Lathif**

Penyelaras Akhir: **Mahesti Hasanah**

Cetakan I, Mei 2018

Diterbitkan oleh Penerbit PolGov

Penerbit PolGov khusus menerbitkan buku-buku politik dan pemerintahan, berada di bawah payung *Research Centre for Politics and Government* (PolGov). PolGov adalah lembaga riset dan publikasi dari Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM. Saat ini PolGov berfokus ke dalam lima tema kunci sesuai dengan kurikulum DPP, yaitu: 1) Kekuasaan, Kesejahteraan, dan Demokrasi; 2) Politik Desentralisasi; 3) Tata Kelola Industri Ekstraktif; 4) Tata Kelola Pemilu; dan 5) Tata Kelola Perbatasan.

Lt. 4 Gedung Fisipol UGM

Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

<http://jpp.fisipol.ugm.ac.id>

Telp./Fax: (0274) 552212

Surel: penerbit.polgov@ugm.ac.id

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
Haryanto

Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal

Penulis: Haryanto; Editor: Hellatsani Mada

Cet.1 — Yogyakarta: Penerbit PolGov, Mei 2018

viii + 108 hlm 20 x 13 cm

ISBN: 978-602-60933-7-0

1. Partai/Politik I. Judul

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur, buku *SOSIALISASI POLITIK: Suatu Pemahaman Awal* akhirnya bisa terbit setelah sekian lama tertunda. Terbitnya buku ini tidak lepas dari pertanyaan yang acap kali muncul, terutama dari kalangan mahasiswa: mengapa ada orang atau kelompok yang tidak peduli terhadap kehidupan politik di sekitarnya dan cenderung sinis, bahkan tidak bersedia aktif di dalamnya? Sementara di sisi lain, terdapat orang atau kelompok yang tidak hanya antusias menyikapi kehidupan politik, tetapi juga dengan penuh kesadaran melakukan tindakan-tindakan politik.

Pertanyaan di atas tampak naif. Namun, bagi mereka yang tertarik mempelajari sikap dan perilaku politik, pertanyaan itu patut dilacak lebih jauh. Pelacakan yang dilakukan salah satunya bisa bermuara pada kata “sosialisasi politik”. Konsep sosialisasi politik setidaknya bisa membantu untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan tersebut.

Sosialisasi politik, sebagai salah satu fungsi yang melekat pada sistem politik, sedikit banyak bisa menjelaskan mengapa ada orang atau kelompok yang tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa dirinya terlibat dalam kehidupan politik. Sementara di sisi lain, ada yang sukarela terjun melakukan aktivitas politik. Selain itu, ada pula orang atau kelompok yang mengetahui dan menyadari bahwa dirinya terlibat dalam kehidupan politik, namun yang bersangkutan bersikap pasif. Kalaupun ada aktivitas politik yang dilakukan, hal itu bukan karena keinginan sendiri.

Buku ini memaparkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan konsep sosialisasi politik. Sebagai bacaan pengantar, buku ini memaparkan pengertian sosialisasi politik dan relevansinya bagi kehidupan politik, terutama bagi sistem politik. Buku ini mengulas pula keterkaitan sosialisasi politik dengan terbentuknya budaya politik yang ada di masyarakat. Tidak dipungkiri, hal tersebut pada gilirannya memberi warna bagi keberlangsungan mekanisme sistem politik. Selain itu, buku ini mengulas secara umum peranan agen, materi, dan metode yang diterapkan dalam proses sosialisasi, serta mengulas pula kemungkinan terjadinya diskontinuitas atau ketidaksinambungan proses sosialisasi politik itu sendiri.

Pada kesempatan ini, kami menghaturkan terima kasih kepada berbagai pihak sehingga buku ini bisa terbit. Para kolega—baik staf pengajar, peneliti, maupun administratif (maaf tidak disebut satu demi satu)—di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM adalah pihak-pihak yang layak memperoleh ucapan terima kasih. Merekalah yang selalu menyemangati agar serakan tulisan ini dibukukan. Dan, buku ini merupakan bukti konkret keberhasilan mereka dalam memberikan dorongan semangat.

Akhir kata, kami membuka masukan, baik berupa saran maupun kritik bagi bahasan yang tertuang dalam tulisan ini. Masukan akan sangat berharga untuk perbaikan kajian ini di kesempatan lain.

Semoga bermanfaat.

Bulaksumur, Maret 2018

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vii
Bab I - Sosialisasi Politik dan Relevansinya	1
Catatan Pembuka	2
Pengertian Sosialisasi.....	8
Pengertian Sosialisasi Politik.....	12
Relevansi Sosialisasi Politik	26
Bab II - Agen, Materi, dan Metode Sosialisasi Politik.....	31
Agen Sosialisasi Politik.....	32
Materi Sosialisasi Politik.....	52
Metode Sosialisasi Politik	58

Bab III - Sosialisasi, Budaya, dan Sistem Politik.	75
Sosialisasi dan Budaya Politik.....	76
Sosialisasi dan Sistem Politik.....	84
Diskontinuitas Sosialisasi Politik.....	90
Catatan Penutup.....	98
Daftar Pustaka.....	103
Indeks	108
Tentang Penulis.....	112

Bab I

Sosialisasi Politik dan Relevansinya

Sosialisasi politik menempati posisi strategis dalam khazanah kehidupan politik. Sebagai salah satu fungsi yang melekat pada sistem politik, tentu relevansi sosialisasi politik tidak diragukan lagi. Bab ini membahas tentang makna terminologi sosialisasi politik dan relevansinya bagi keberadaan sistem politik serta bagi politik itu sendiri sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari (*daily politics*). Bab ini diawali dengan paparan tentang pengertian umum sosialisasi, kemudian dikerucutkan guna memahami makna sosialisasi politik.

Pemahaman yang utuh tentang sosialisasi politik akan memudahkan untuk menelisik, mengapa kajian ini dinilai penting? Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi keengganan dan keraguan untuk melakukan kajian tentang sosialisasi politik. Dengan kata lain, pemahaman akan relevansi yang utuh menjadikan pengkajian sosialisasi politik semakin serius dan mantap dilakukan. Bab ini diawali dengan catatan pembuka yang mempertanyakan tentang bagaimana cara seseorang mendapatkan pengetahuan politik? Pertanyaan seperti itu tampak naif tetapi penting diajukan dalam konteks mengkaji sosialisasi politik. Harapannya, pertanyaan dan ulasan dalam catatan pembuka bisa menghantarkan pembaca untuk masuk lebih jauh dalam menelisik relevansi sosialisasi politik. Kemudian, setelah catatan pembuka, dipaparkan kajian sosialisasi politik dan relevansinya.

Catatan Pembuka

Ketika beberapa orang diberi pertanyaan tentang bagaimana mereka bisa tahu tentang politik? Sudah dapat diduga, akan ada beraneka macam jawaban. Salah satunya, mungkin dijawab tanpa berpikir panjang, tahu tentang politik dari pendidikan yang ditempuh di sekolah. Menurutnya, sekolah merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap

proses pembelajaran politik pada masyarakat awam. Pembelajaran politik, diberikan baik langsung maupun tidak langsung, kepada individu semenjak anak-anak. Sebagaimana diketahui mulai dari sekolah dasar, guru telah mengajarkan kepada para siswa, misalnya mengenai dasar negara, lambang negara, lagu kebangsaan, dan bendera negara. Di sekolah menengah tingkat pertama ataupun atas, guru mengenalkan model sistem pemerintahan, lembaga negara/pemerintahan, dan lembaga politik seperti partai politik.

Selain itu, ada pula jawaban yang menyatakan bahwa mereka belajar politik atau mengetahui kehidupan politik dari media massa. Media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, ataupun media sosial lainnya, merupakan instrumen yang berfungsi sebagai agen belajar politik bagi mereka. Melalui media tersebut, mereka memperoleh informasi berupa pengetahuan politik sehingga wawasannya tentang politik bertambah. Sebagai contoh, seseorang bisa memperoleh informasi perihal sistem pemilihan yang diterapkan, proses penyelenggaraannya, ataupun terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga. Melalui berbagai media itu, seseorang juga bisa mengetahui proses pembuatan suatu peraturan sebagai kebijakan yang mengikat seluruh masyarakat dan mengetahui alur

proses pengajuan keberatan terhadap peraturan tersebut.

Berbeda dengan mereka yang mulai beranjak dewasa, mungkin mereka akan menjawab bahwa proses pembelajaran politik didapatkan dari pengalamannya mengikuti proses politik secara langsung. Mereka aktif dalam organisasi partai politik sehingga pengalamannya bermanfaat menambah wawasan politik. Walaupun mungkin aktivitasnya dalam politik praktis mengalami pasang surut.

Ada pula jawaban yang cukup mengejutkan, meski jumlahnya sedikit, yaitu mereka tidak tahu-menahu perihal politik. Mereka tetap ikut memberikan suara dalam pemilihan umum, sebagai misal, karena diperintah oleh pihak tertentu, bisa pemerintah, badan penyelenggara pemilihan ataupun partai politik. Mereka tidak mengetahui makna suara yang diberikan dalam pemilihan umum, pun tidak paham makna memilih wakil rakyat, dan tentunya juga tidak paham makna dari demokrasi. Hal yang lebih mengkhawatirkan lagi apabila mereka tidak mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Contoh jawaban-jawaban di atas merupakan gambaran bahwa kemungkinan ada sekelompok individu yang tidak mengetahui dan memahami bahwa dirinya ada dan terlibat dalam kehidupan

politik. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman tersebut bisa jadi berangkat dari sikap tidak peduli terhadap aktivitas yang berlangsung di panggung politik yang ada di sekitarnya. Tidak tahu, tidak paham, dan sikap tidak peduli itu pun bisa disebabkan karena kondisi ekonomi yang bersangkutan terbatas, tidak bisa mengenyam pendidikan yang memadai atau tidak bisa memperoleh informasi melalui media massa.

Uraian tersebut menyadarkan bahwa pengetahuan dan pemahaman individu bervariasi, tidak semua tahu dan paham tentang politik. Di sisi lain, penjelasan di atas memberi informasi beragam cara dan waktu agar seseorang bisa mengerti dan memahami politik. Memahami bagaimana caranya agar seseorang bisa mengerti dan belajar mengenai politik, bahkan hingga mengimani atau menjadi pengikut setia pandangan politik tertentu, tidaklah mudah. Hal ini karena pengetahuan seseorang tentang politik memiliki spektrum yang sangat luas dan tidak mudah untuk didefinisikan.

Akan tetapi, beberapa jawaban yang telah disinggung pada paragraf sebelumnya tidak mampu menghentikan para ilmuwan politik untuk menelaah sejak kapan seseorang belajar politik hingga menjadikannya tahu dan paham tentang politik. Bagaimana cara mereka belajar politik? Apa yang dipelajari saat belajar politik? Apakah sebatas belajar

sistem pemerintahan negara dan sekadar mengetahui keberadaan serta fungsi lembaga-lembaga negara atau pemerintahan? Atau, juga mengenai bagaimana caranya untuk menyalurkan kepentingan yang menjadi aspirasinya, dan bagaimana proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang mengikat anggota masyarakat? Bahkan, tentang bagaimana tata cara atau prosedur untuk menolak suatu kebijakan yang diberlakukan sistem politik. Berbagai pertanyaan tersebut sebetulnya tidak jarang dilontarkan, jawabannya pun telah banyak dikaji.

Dalam ilmu politik, dikenal sebuah konsep “*political socialization*” atau “sosialisasi politik”. Konsep itu sering dijadikan pijakan untuk mengkaji, misalnya, bahwa pembelajaran politik sudah dimulai sejak anak-anak. Pada masa itu, pembelajaran lewat keluarga adalah yang pertama dan utama. Sebab, keluarga merupakan tempat pertama individu melakukan interaksi dengan pihak lain. Namun, ada pula ilmuwan yang menekankan bahwa lingkungan pergaulan memberi andil lebih besar dalam proses menambah pengetahuan politik. Basis argumennya, seseorang relatif lebih intens berinteraksi dengan sesama dalam lingkungan pergaulan, seperti teman atau rekan seprofesi dibandingkan anggota keluarga.

Selain itu, paparan ini juga mengkaji keterkaitan antara pembelajaran politik dengan keterlibatan

atau partisipasi politik seseorang serta hubungannya dengan kompetensi individu sebagai warga negara. Lebih dari itu, paparan ini mengkaji pula korelasi antara pembelajaran politik dengan corak budaya politik yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, menelaah keterkaitan antara sosialisasi politik dengan corak budaya politik, yang ujungnya adalah mengkaji keterkaitannya dengan eksistensi sistem politik dimana sosialisasi politik merupakan salah satu faktor penentunya.

Dalam jagad ilmu politik, konsep sosialisasi politik telah lama dikenal. Namun, berbasis konsep itu, ternyata belum bisa membuat kesepakatan tunggal untuk menjawab pertanyaan di awal tulisan ini. Bisa dimaklumi, karena kajian sosialisasi politik dilakukan melalui metode atau pendekatan yang tidak sama. Terlebih lagi, kehidupan politik merupakan fenomena yang sangat dinamis. Upaya menjadikan kajian sosialisasi politik sebagai sesuatu yang dinamis tergantung pada konteks sosial masyarakatnya. Dengan demikian, sosialisasi politik akan selalu relevan lantaran kajian ini mencoba menjabarkan relasi antara individu dengan struktur sosialnya di masyarakat sekaligus menjelaskan dinamika dalam masyarakat itu sendiri.

Demikianlah, buku tipis ini akan mencoba mengenalkan dan mengelaborasi konsep atau teori

sosialisasi politik yang telah banyak digunakan media tahun 50-an. Buku ini juga akan mencoba menerangkan bagaimana konsep sosialisasi politik masih bisa relevan di masa kini meskipun sudah tidak populer. Berkaca pada berbagai paparan di atas, buku ini ingin menempatkan diri sebagai bacaan awal bagi siapa pun yang tertarik untuk belajar sosialisasi politik. Pendek kata, buku ini ingin menjadi medium awal untuk belajar mengenai bagaimana seseorang bisa mengerti, memahami, dan pada akhirnya mengimani berbagai macam spektrum dalam politik, yang turut membentuk sikap dan perilaku politik.

Pengertian Sosialisasi

Membahas tentang bagaimana seseorang memperoleh wawasan dan pemahaman politik, sama dengan menelaah proses sosialisasi politik. Dengan demikian, dirasa perlu untuk lebih dulu mengenali makna sosialisasi. Hal ini karena sosialisasi politik dapat dinyatakan sebagai bagian dari proses sosialisasi pada umumnya.

Berbagai kalangan memberi pengertian sosialisasi, salah satunya Alex Inkeles yang menyatakan bahwa:

“From sociological point of view, socialization refers to the process whereby individuals acquire the personal system properties—the knowledge, skill, attitudes, values, needs and motivations, cognitive, affective and conative patterns—which shape their

adaptation to the physical and socio-cultural setting in which they live".¹

Senada dengan Inkeles, Fuller dan Jacobs mengemukakan, "*Socialization, in the most general sense, is the process through which individuals acquire the social knowledge and skills necessary to enable them to interact with others*".²

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan proses yang melekat dan dialami setiap individu untuk memperoleh pengetahuan, nilai, ataupun keterampilan agar mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Karena tidak spesifik menyebutkan tempat untuk mendapatkan pengetahuan, nilai, atau keterampilan, maka bisa dinyatakan sosialisasi berlangsung di semua tipe masyarakat, baik itu tradisional, sedang berkembang, maupun modern.

Sementara itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa sosialisasi merupakan proses belajar dan internalisasi dengan kondisi sosial budaya di lingkungannya, yang berlangsung sepanjang hidup

1 Alex Inkeles, "Social Structure and Socialization" dalam David A. Goslin (ed.), *Handbook of Socialization, Theory and Research* (Chicago: Rand Macmillan & Company, 1969), hlm. 605 – 606.

2 John Scott Fuller and Jerry Jacobs, "Socialization", dalam Jack D. Douglas (ed.), *Introduction to Sociology* (A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.: The Free Press, 1973), hlm. 169.

seseorang. Pendapat ini dikemukakan oleh Guy Rocher yang menyatakan bahwa:

*”Socialization as the process through which the human individual learns and internalizes, throughout his life, the sociocultural elements of his environment, integrating them into the structure of his personality under the influence of meaningful social agents and personal experiences, and thus adapting himself to the social environment in which he must life”.*³

Ada pula Barrie Stacey, memandang sosialisasi sebagai proses individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, keyakinan, dan nilai-nilai mendasari terbentuknya sikap tertentu.⁴ Baginya, melalui proses sosialisasi, seseorang diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai anggota masyarakat dan belajar untuk hidup bersama di dalamnya.

Apabila Stacey menekankan sosialisasi adalah sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup seseorang, lain halnya Gabriel Almond⁵ yang

3 Guy Rocher, *A General Introduction to Sociology: A Theoretical Perspective* (Macmillan Company of Canada Limited, 1972), hlm. 108.

4 Barrie Stacey, *Political Socialization in Western Society* (London: Edward Arnold (Publishers) Ltd., 1978), hlm. 2.

5 Gabriel A. Almond, “Political Socialization and Political Culture”, *Comparative Politics Today: A World View* (Boston: Little, Brown and Company, 1974), hlm. 43. Pendapat Gabriel A. Almond tersebut dapat pula dilihat pada Mohtar Mas’oed dan Colin Mac Andrews

menyatakan bahwa sosialisasi menunjukkan proses dimana anak-anak atau generasi muda diperkenalkan nilai-nilai dan sikap-sikap yang ada di masyarakatnya, dan bagaimana cara mereka mempelajari peran yang diharapkan kelak ketika berusia dewasa. Dari narasi tersebut, secara implisit menyiratkan ada pihak yang memberi pengajaran ke generasi muda dalam proses sosialisasi. Meski Almond tidak menyebut secara gamblang tetapi dapat disimpulkan pihak itu adalah generasi yang lebih tua.

Dari beragam pengertian sosialisasi yang telah dijabarkan, benang merahnya adalah sosialisasi merupakan proses pengajaran yang diberikan kepada setiap individu sebagai anggota masyarakat. Semua individu tanpa terkecuali—suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar—akan mengalami sosialisasi sepanjang hidupnya. Meskipun dalam proses ini terdapat kecenderungan bahwa pada satu sisi, generasi muda akan bertindak sebagai pihak yang menerima pengajaran, sementara pada sisi yang lain, generasi yang lebih tua akan berperan sebagai pihak yang memberikan pengajaran.

Secara longgar dapat pula disimpulkan, sosialisasi adalah proses pengajaran dimana individu

(eds.), *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978), hlm. 32.

sebagai anggota masyarakat akan memperoleh nilai, keyakinan, sikap, atau perilaku tertentu dari masyarakat. Apabila dikaitkan dengan sosialisasi politik, maka yang akan diperoleh individu dari proses pengajaran adalah nilai, keyakinan, sikap, ataupun perilaku yang bermuatan atau berhubungan dengan dimensi politik.

Pengertian Sosialisasi Politik

Pada uraian sebelumnya, dinyatakan bahwa ditinjau dari kacamata sosiologis, sosialisasi merupakan proses yang melekat dalam masyarakat, baik yang masih tradisional, sedang berkembang, ataupun sudah modern. Proses sosialisasi digunakan oleh banyak ilmuwan sosial untuk menjelaskan transfer nilai, pengetahuan, ataupun keterampilan dari satu individu ke individu lain. Sosialisasi juga merupakan sarana atau salah satu cara yang biasa dilakukan di tengah masyarakat untuk mengenalkan bermacam peran sosial. Jika dikaitkan dengan politik, maka sosialisasi politik merupakan proses yang berdimensi politik; sehingga politik bisa dimaknai sebagai sebuah pengetahuan, nilai, bahkan keterampilan.

Makna sosialisasi politik telah banyak diulas dalam berbagai kepustakaan, oleh sebab itu, subbab ini akan mengulasnya secara singkat.

1) Apa itu Sosialisasi Politik?

Menurut Dennis Kavanagh, sosialisasi politik ialah proses individu dapat belajar politik supaya mampu membentuk budaya politik di masyarakat, dalam arti melestarikan ataupun mengubahnya.⁶ Paralel dengan pendapat tersebut, Kenneth P. Langton mengungkapkan bahwa “*political socialization, in the broadest sense, refers to the way society transmits its political culture from generation to generation.*”⁷ Pemahaman atas budaya politik yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya memang relatif longgar. Akan tetapi, ungkapan Langton bisa dimaknai ketika masyarakat dapat memperoleh nilai, keyakinan, sikap, atau perilaku politik; hal itu tidak lain adalah bagian integral dari sebuah budaya politik.

Ada pula Levine yang melihat sosialisasi politik sebagai proses belajar kehidupan politik.⁸ Lewat proses ini, budaya politik dapat dilestarikan ataupun diubah, seseorang bisa belajar menghormati otoritas yang ada, berpartisipasi dalam aktivitas politik, toleransi saat berbeda pendapat, menaati hukum yang berlaku, pun

6 Dennis Kavanagh, *Political Science and Political Behaviour* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1983), hlm. 34.

7 Kenneth P. Langton, *Political Socialization* (London: Oxford University Press, Inc., 1969), hlm. 4.

8 Herbert M. Levine, *Political Issues Debated: An Introduction to Politics* (N. J: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1982), hlm. 149.

kebalikannya. Levine juga beranggapan bahwa proses sosialisasi politik dapat menunjukkan bagaimana seorang warga negara meraih pengetahuan sehingga mewarnai sikap, keyakinan, ataupun pendapatnya terhadap sistem politik.

Begitu pun Almond, baginya, sosialisasi politik memperlihatkan proses pembentukan sikap dan tingkah laku politik juga sebagai sarana suatu generasi untuk mewariskan patokan dan keyakinan politik kepada generasi berikutnya.⁹ Senada dengan pendapat tersebut, menurut Alfian, melalui proses sosialisasi politik anggota masyarakat bisa mengenal, memahami, dan menghayati nilai politik tertentu, yang memengaruhi sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari.¹⁰

Pendapat serupa juga disampaikan Sigel, yakni sosialisasi politik adalah proses pembelajaran secara gradual tentang norma, sikap, dan perilaku yang diterima dan dipraktikkan dalam sistem politik yang tengah berlangsung.¹¹ Sigel pun menjelaskan,

9 Gabriel A. Almond (ed), *Op. cit.*, hlm. 44. Pendapat Almond tersebut dapat pula dilihat pada Mohtar Mas'oe'd dan Colin Mac Andrews (eds.), *Op. cit.*, hlm. 32.

10 Alfian, "Perbandingan Politik dan Generasi Muda", *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1978), hlm. 233.

11 Roberta Sigel, "Assumptions about the Learning of Political Values", *The Annals of the American Academy of Political and Social*

sosialisasi merupakan pelatihan yang harus dijalani oleh setiap individu agar memiliki kemampuan yang memadai di masyarakat. Dalam konteks ini, kemampuan yang dimaksud adalah mampu berpartisipasi dalam politik, mengerti tentang peran dan fungsi politisnya, serta memahami norma-norma politik. Maka dari itu, Sigel menyatakan bahwa tujuan sosialisasi politik adalah melatih dan mengembangkan individu supaya menjadi anggota masyarakat politik yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan menjadi anggota masyarakat yang menjalankan fungsinya dengan baik mencakup mulai dari anggota masyarakat yang bersikap patuh tetapi pasif sampai kepada anggota masyarakat yang sukarela berpartisipasi dalam menjalankan fungsinya sebagai warga negara.

Greenstein memiliki pendapat yang paralel dengan Sigel, menurutnya, pengertian sosialisasi politik secara sederhana dapat dimaknai sebagai pembelajaran politik yang diberikan melalui seorang agen yang mengerti tentang politik.¹² Dalam hal ini, agen tidak selalu dimaknai individu tetapi juga berbagai macam proses sosial, termasuk institusi.

Science, Vol. 361, September 1965, hlm. 2.

- 12 Greenstein dalam David L. Sills (ed.), *International Encyclopedia of the Social Science*, Vol. 14. (The Macmillan Company & The Free Press, 1968), hlm. 551.

Greenstein pun memilah sosialisai politik menjadi dua pengertian, yakni dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit dinyatakan bahwa, “*narrowly conceived, political socialization is the deliberate inculcation of political information, values, and practices by instructional agents who have been formally charged with this responsibility*”. Sedangkan dalam pengertian luas, dinyatakan bahwa “*a broader conception would encompass all political learning, formal and informal, deliberate and unplanned, at every stage of the life cycle, including not only explicitly political learning but also nominally nonpolitical learning that affects political behavior*”.

Sosialisasi politik menurut Greenstein lebih terperinci karena menunjukkan perlunya agen-agen tertentu untuk menanamkan informasi, nilai, dan tindakan politik. Demikian pula ditunjukkan proses berlangsungnya mencakup pembelajaran politik secara eksplisit maupun implisit.

Berbeda dengan pendapat yang dipaparkan sebelumnya, pendapat lain dilontarkan oleh Marian D. Irish dan Elke Frank menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pengenalan sistem politik yang telah ada. Dalam hal ini, sosialisasi politik lebih banyak berfungsi sebagai medium untuk mentransfer semua hal yang berkaitan dengan sebuah sistem politik. Dinyatakannya bahwa sosialisasi politik merupakan:

*”Process wherein individual members of a state acquire their feelings and behavioral attitudes about government and politics generally, their sense of national identification, loyalty to the government, allegiance to the leadership, and their understanding of the roles they expect (or are expected) to play as participants in the political system.”*¹³

Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa sosialisasi politik mempunyai sasaran, yakni membentuk sikap individu terhadap pemerintah dan sistem politik, seperti menumbuhkan rasa nasionalisme, loyal terhadap pemerintah, mematuhi pemimpinnya, dan memahami peran mereka saat berpartisipasi dalam sistem politik.

Pendapat serupa yang memandang sosialisasi politik mengarah pada pengenalan sistem politik juga disampaikan oleh J. Coleman:

”Political socialization refers to that process by which individuals acquire attitudes and feelings toward the political system and toward their role in it, including cognition (what one knows or believes about the system, its existence as well as its modus operandi), feeling (how one feels toward the system, including loyalty and a sense of civic obligation), and one’s

13 Marian D. Irish and Elke Frank, *Introduction to Comparative Politics* (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc., 1978), hlm. 150.

sense of political competence (what one's role is or can be in the system)".¹⁴

Coleman menekankan pengenalan sistem politik adalah bagaimana seseorang dapat memperoleh pengetahuan tentang sistem politik, perasaannya terhadap sistem itu, dan bagaimana kompetensi politik di dalamnya.

Beberapa pendapat yang dijabarkan para ahli itu memberi gambaran mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan sosialisasi politik. Masing-masing memiliki fokus atau titik tekan yang berbeda, tergantung cara mereka mendefinisikan politik. Misalnya, pendapat yang menekankan pada nilai, norma, sikap, dan perilaku yang pada gilirannya membentuk budaya politik, seperti yang telah diungkap oleh Langton, Levine, dan Almond. Ketiga ilmuwan politik tersebut banyak menekankan bahwa sosialisasi politik merupakan upaya untuk melestarikan budaya politik, sebagai nilai penting bagi masyarakat. Ada juga Irish dan Frank yang memfokuskan sosialisasi politik sebagai mekanisme untuk mendorong bekerjanya sebuah sistem politik, dan yang terakhir, Coleman, menitikberatkan

14 Coleman, "Introduction", *Education and Political Development* (Princeton: Princeton University Press, 1965), hlm. 18.

sosialisasi politik sebagai upaya mengenalkan sistem politik kepada seseorang.

Berbagai pendapat di atas menjadi bukti konkret bahwasanya tidak ada tafsir tunggal tentang sosialisasi politik. Perlu juga diketahui bahwa perbedaan pendapat itu tidak serta-merta hadir tetapi sangat mungkin berkaitan dengan objek penelitian dan pendekatan yang digunakan.

Meskipun demikian, bisa dicermati bahwa pendapat-pendapat tersebut secara eksplisit menyepakati tujuan akhir dari berlangsungnya sosialisasi politik adalah demi terciptanya partisipasi aktif dari individu terhadap proses-proses politik. Jika ditarik lebih jauh, berlangsungnya sosialisasi politik diharapkan mampu memperluas pengetahuan atau wawasan politik yang dimiliki seseorang sehingga meningkatkan partisipasi politik yang bisa menopang bekerjanya sistem politik demokratis.

2) Tahapan Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik juga merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup seseorang. Menurut beberapa ilmuwan politik, ada masa-masa penting bagaimana proses sosialisasi politik memberi andil bagi terbentuknya nilai, sikap, ataupun perilaku individu terhadap politik. Sebagai suatu proses, periode berlangsungnya sosialisasi politik

dapat dipilah menjadi beberapa tahap. Robert H. Blank memilahnya menjadi tiga, yaitu tahap anak-anak, remaja, dan dewasa.¹⁵ Berkenaan dengan tahapan proses sosialisasi politik, Blank menyatakan pendapatnya bahwa:

“The basic foundation stage takes place in early childhood and results in the formation of general political attachments and loyalties. It appears likely that the strongest influences during this critical formation stage are those which exercise authority over the child, especially the family and the schools. The second stage shifts emphasis from development of emotional attachments to the acquiring specific knowledge about political institutions and feelings toward them. The shift in emphasis is marked by the growing importance of agents who stand equal to the person, such as peer groups. The final stage, which arrives in late adolescence, is one of reactions to specific policies, personalities and events. Although peer groups are still important during adulthood, political experiences themselves become influential at this time”.

Pada masa anak-anak, sebagai tahap awal kehidupan seseorang, sosialisasi politik lebih menekankan pada upaya membentuk loyalitas politik, umumnya dilakukan pihak yang mempunyai otoritas terhadap

15 Robert H. Blank, *Political Parties: An Introduction* (Englewood, Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1980), hlm. 244.

anak, yaitu keluarga dan sekolah. Salah satu caranya melalui pengenalan lagu kebangsaan atau bendera nasional sejak dini.

Pada tahap berikutnya, sosialisasi diarahkan kepada individu remaja atau memasuki awal usia dewasa. yang relatif intens membangun relasi dengan kelompok pergaulannya. Pada tahap ini, sosialisasi politik memberi tekanan pada upaya pengembangan emosional, demi memperoleh pengetahuan tentang lembaga politik dan apa yang dirasakan terhadap keberadaan lembaga tersebut. Kelompok pergaulan, sebagai pihak yang melakukan sosialisasi, mempunyai kedudukan sederajat dengan sasaran sosialisasi.

Pada tahap akhir, yakni saat individu dewasa, proses sosialisasi ditandai adanya pengaruh kebijakan dan peristiwa tertentu pada individu yang menjadi target sosialisasi. Selain masih berperannya kelompok pergaulan dalam proses ini, pengalaman politik yang dimiliki seseorang dapat pula memberi pengaruh pada mereka.

Sebagaimana dipaparkan oleh Blank, proses sosialisasi politik memiliki penekanan yang berbeda pada setiap tahapannya. Hal yang perlu dicermati adalah mengapa di tahap awal, sosialisasi politik lebih menekankan upaya terbentuknya loyalitas politik; di tahap kedua, fokus pada upaya pengenalan lembaga politik, sementara tahap akhir, menitikberatkan

pengaruh kebijakan atau peristiwa politik tertentu terhadap individu.

Dugaan terhadap hal itu tidak lepas dari faktor usia individu yang menjadi sasaran sosialisasi. Sebagai tahapan paling awal, loyalitas politik anak-anak perlu dibentuk lebih dulu, setelahnya baru dikenalkan adanya lembaga politik. Dengan pengetahuan itu, remaja bisa mulai menilai dan berpendapat tentang aktivitas politik yang ada. Tahap berikutnya, berbekal pengetahuan yang dimiliki, ditambah pengaruh kebijakan dan pengalaman politik yang biasanya dialami individu dewasa, sosialisasi politik berlangsung.

3) Dua Perspektif Sosialisasi Politik

Proses sosialisasi politik dapat ditelaah dengan dua perspektif, yakni *teaching perspective* dan *learning perspective*. Hal ini dinyatakan oleh Paul Alan Beck bahwa:

*"The first perspective, which I shall call the 'teaching perspective', conceives of political socialization as the process through which political orientations are taught. The second, or 'learning perspective', emphasizes the individual's own learning activities and development and relegates teaching per se to a secondary, though not unimportant role."*¹⁶

16 Paul Allen Beck, "The Role of Agents in Political Socialization", dalam Stanley Allen Renshon (ed.), *Handbook of Political*

Dalam pernyataannya, Alan Beck secara tersirat mengemukakan bahwa perbedaan antara *teaching perspective* dan *learning perspective* terletak pada aktivitas individu sebagai sasaran sosialisasi politik. *Teaching perspective* merujuk pada proses seseorang yang diberi sosialisasi, sikapnya pasif karena hanya diajari atau menerima materi sosialisasi tanpa menunjukkan respons balik. Sementara itu, *learning perspective* merujuk pada kondisi individu yang bersikap aktif karena mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri selama proses sosialisasi berlangsung.

Teaching perspective memberi gambaran bahwa sosialisasi politik berjalan satu arah. Masyarakat hanya menerima materi sosialisasi dan cenderung tidak menunjukkan sikap kritis. Sedangkan *learning perspective* menggambarkan seseorang tidak hanya pasif menerima materi sosialisasi tetapi juga diberi ruang untuk menolak atau mengkritisi materi.

Oleh karena itu, baik pemateri atau sasaran sosialisasi memiliki peluang yang sama dalam mengendalikan interaksi selama proses berlangsung. Richard E. Dawson mendukung hal tersebut. Menu-

Socialization (A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.: The Free Press, 1977), hlm. 115.

rutnya secara sederhana, sosialisasi politik dapat dipandang sebagai:

“... . The processes through which an individual acquires his particular political orientation.... We deliberately use the term ‘acquire’ to stress that political socialization is an interactive process between the individual being socialized and the polity and social agents that socialize him.”¹⁷

Pendapat tersebut dengan jelas menekankan bahwa ada interaksi antara individu yang diberi dengan pihak yang memberi selama proses sosialisasi politik.

4) Elemen Sosialisasi Politik

Selain tahapan dan perspektif sosialisasi politik, dalam proses sosialisasi politik terdapat pula beberapa elemen penting untuk diketahui. Langton berpendapat bahwa:

”Political socialization is basically a continuous social and psychological process composed of four elements. It involves (1) an interaction-acquisition process, (2) between the individual being socialized, (3) the agency which acts as the vehicle of socialization, and (4) the political behavior patterns, perceptions, and attitudes which he learns.”¹⁸

17 Richard E. Dawson, *et. al.*, *An Analytic Study Political Socialization* (Boston: Little, Brown and Company, 1977), Second Edition, hlm. 33.

18 Kenneth P. Langton, *Op. cit.*, hlm. 8.

Elemen yang dikemukakan Langton menyangkut tiga hal. Pertama, proses sosialisasi politik memerlukan elemen seperti agen atau aktor, sebagai pihak yang aktif memberikan materi sosialisasi. Kedua, harus dipastikan ada materi yang akan diberikan. Materi atau isi yang dimaksud tidak melulu soal politik tetapi bisa juga mengenai hal lain, asalkan mampu memengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap politik. Ketiga, harus ada interaksi antara agen dengan target sosialisasi. Dalam proses ini, interaksi bisa menentukan proses penerimaan, bahkan penolakan materi sosialisasi politik.

Memperkuat pendapat yang dijabarkan Langton, perlu pula menyimak pernyataan Laswell bahwa dalam proses sosialisasi politik perlu memperhatikan “(a) *who*, (b) *learns what*, (c) *from whom*, (d) *under what circumstances*, and (e) *with what effects*.”¹⁹ Pernyataan Laswell menekankan proses sosialisasi melibatkan dua pihak, yakni pemberi dan penerima materi sosialisasi. Interaksi tersebut merupakan proses pembelajaran tentang materi tertentu yang berlangsung pada kondisi tertentu dan akan berdampak tertentu pula dalam bidang politik.

19 Pendapat Harold Laswell dapat dilihat pada David L. Sills (ed.), *Op. cit.*, hlm. 552.

Dengan memperhatikan berbagai pendapat tentang sosialisasi politik, dapat ditarik benang merah bahwa dalam proses sosialisasi politik terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi. Harus ada pihak yang menyampaikan materi, mencermati metode yang dipakai saat proses sosialisasi politik, serta memperhatikan target atau sasaran sosialisasi.²⁰

Relevansi Sosialisasi Politik

Sebelum menjelajah lebih jauh dan mengulas lebih detail tentang sosialisasi politik, signifikansi dalam memahami sosialisasi politik penting untuk ditelaah. Perlu ditelusuri mengapa konsep sosialisasi politik hingga kini masih relevan dibahas dalam konteks berlangsungnya sistem politik. Atas dasar itulah, uraian pada subbab ini memaparkan beberapa hal penting terkait urgensi dari mempelajari atau setidaknya mengetahui perihal sosialisasi politik.

Seseorang terlahir di dunia tidak serta-merta mempunyai pengetahuan. Pengetahuan, wawasan, dan keterampilan seseorang bertambah dan diasah melalui proses interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Diawali oleh keluarga, sebagai lingkungan yang paling

20 Bandingkan dengan ulasan Andre Bayo Ala, "Krisis Sosialisasi Politik", *Majalah Mahasiswa Vol. 32*, tahun VI, November 1982, hlm. 41.

dekat, kemudian lingkungan sosial sebagai hasil interaksinya dengan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, seseorang berinteraksi di dalam cakupan sosio-kultural, sosio-ekonomi, dan sosio-politik. Hal itulah yang membuat sosialisasi politik penting untuk dipelajari. Dengan sosialisasi politik, setidaknya tersedia ruang untuk merenungkan bagaimana seseorang memahami sekaligus merespons kehidupan politik yang sudah ada sejak ia belum lahir. Ketika menelaah relevansi dari sosialisasi politik, muncul pertanyaan mendasar dan filosofis, mengapa orang harus tahu tentang politik atau memiliki sikap politik?

Berbagai institusi kekuasaan dan politik sering diperbincangkan saat ini, termasuk sistem atau model tata kelola pemerintahan di dalamnya. Memperbincangkan keberadaan institusi tersebut, langsung atau tidak langsung menempatkan individu-individu sebagai bagian dari institusi yang sedang diperbincangkan. Sederhananya, para individu sejatinya bersinggungan dan menjalin relasi dengan institusi kekuasaan yang ada. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bila mereka menjadi bagian dari institusi kekuasaan.

Selain alasan keterikatan individu dengan sebuah sistem politik dan lembaga kekuasaan negara, ada pendapat lain yang mencoba mengemukakan alasan pentingnya sosialisasi politik, jika dilihat dari sudut

pandang politik. Adalah Ben Rosamond, yang mengangkat tiga alasan pentingnya sosialisasi politik bagi politik itu sendiri—baik sebagai ilmu, teknik dalam konteks sistem politik, dan sebagai *daily politics*.²¹ Rosamond membeberkan implikasi dari ketiganya.

Pada konteks sosialisasi politik sebagai sebuah ilmu, Rosamond menjelaskan bahwa semua orang yang bergelut dengan politik, termasuk para ilmuwan, selalu tertarik dengan sikap, perilaku, maupun aksi politik. Beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait hal itu, di antaranya mengapa seseorang bersedia terlibat dalam aksi-aksi politik yang bisa memengaruhi kehidupannya, mengapa ada individu yang memiliki sikap berbeda terhadap suatu fenomena yang sama dalam konteks politik, mengapa ada individu yang mengimani ideologi tertentu? Konsep sosialisasi politik bisa dijadikan alat bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, khususnya mengenai sikap dan perilaku politik. Contohnya, sikap dan perilaku pemilih (*voting behavior*) yang dipengaruhi oleh proses sosialisasi politik.

Menurut Rosamond, alasan sosialisasi politik mampu memberikan sumbangan penting bagi ilmu

21 Ben Rosamond, “Political Socialization” dalam *Politics: An Introduction*, (London and New York: Routledge, 2002).

politik bisa dilacak dari sejarahnya. Perkembangan studi sosialisasi politik erat kaitannya dengan kemunculan pendekatan behavioralisme, yang berkembang tahun 1950-an di Amerika Serikat. Behavioralisme, yang banyak bergantung pada metode empiris, seperti survei dan eksperimen sosial, memengaruhi studi-studi politik—tidak terkecuali sosialisasi politik—sebagai cara lain untuk memahami politik, selain pendekatan legal formal dan institusional yang telah lebih dulu berkembang. Tidak perlu heran jika sosialisasi politik cenderung mengkaji sikap dan perilaku politik, dan hal ini tampaknya berlangsung sampai saat ini. Selain itu, perspektif psikokultural juga banyak diacu oleh sosialisasi politik.

Sikap dan perilaku politik membantu untuk memahami bahwa penerimaan individu terhadap fenomena dan objek politik (institusi politik) berbeda-beda. Pada gilirannya, hal ini memengaruhi keberlangsungan sistem politik. Berangkat dari kesadaran itu, maka diperlukan model sosialisasi politik yang mampu mendukung sistem politik dan ikut andil dalam terbentuknya budaya politik.²²

22 Rosamond, *Ibid.*, hlm. 72-73. Dalam tulisannya, Rosamond memberikan contoh bagaimana rezim komunis pemerintahan Uni Soviet menggunakan kurikulum pendidikan untuk mengontrol moral dan etika anak-anak muda.

Rosamond menyatakan bahwa sosialisasi politik masih relevan dalam kaitannya dengan sistem politik yang berlaku, termasuk rezim politik di dalamnya, karena sistem tersebut bisa diukur akan diterima atau ditolak oleh masyarakat.

Rosamond pun menyinggung bahwa penentu sikap dan perilaku politik tidak melulu politis. Mungkin terdengar rumit, lantaran pemahaman tentang politik sering terpancang pada institusi dan nilai merupakan hal yang “bukan politik” meski sesungguhnya berpengaruh. Banyak hal lain dalam kehidupan sehari-hari yang bisa mewarnai dan membentuk pandangan, sikap, dan perilaku politik. Misalnya, nilai-nilai yang diterima dan meresap pada pegawai di birokrasi sipil berbeda dengan nilai yang dimiliki pegawai di birokrasi militer, padahal lingkungan keduanya sama-sama hierarkis.

Bab II

Agen, Materi, dan Metode Sosialisasi Politik

Agen, materi, dan metode sosialisasi politik pada hakikatnya berpayung pada proses sosialisasi politik. Ketiganya, secara berurutan dirangkum dalam bab ini karena memiliki keterkaitan yang erat. Ulasan tentang agen pasti menyentuh tentang materi sebagai “sesuatu” yang disosialisasikan, begitu pula mengenai metode yang diterapkan agen untuk menyampaikan materi. Keberlangsungan proses ini tidak bisa lepas dari peran agen sebagai pihak yang melakukan sosialisasi, materi sebagai isi sosialisasi, dan metode sebagai cara materi atau isi tersebut bisa tersampaikan.

Secara implisit, dibahas pula pihak-pihak yang terkena sosialisasi. Mereka adalah individu yang terpapar nilai, norma, sikap, orientasi, ataupun keyakinan yang ada dalam materi, tanpa pandang usia dan sadar maupun tidak jika terpapar sosialisasi politik, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Agen Sosialisasi Politik

Salah satu elemen penting dari sosialisasi politik adalah keberadaan agen atau aktor yang melakukan proses sosialisasi politik. Tanpa agen sebagai generator penggerak, sudah pasti proses tersebut tidak akan berjalan. Akibatnya, tanpa kehadiran agen atau aktor sebagai penggerak, sosialisasi politik bisa berpotensi mengganggu bekerjanya sistem politik; paling tidak mengganggu berlangsungnya proses input-output yang menjadi karakter utama sistem politik. Tidak berlebihan jika ada anggapan bahwa proses sosialisasi politik tanpa agen adalah mustahil, lantaran kunci sosialisasi politik mensyaratkan adanya interaksi antara agen dengan individu.

Meski demikian, yang dimaksud dengan agen atau aktor sosialisasi tidak dimaknai sebatas individu saja, lebih dari itu, tidak jarang merujuk pada subjek kondisi tertentu yang menjaga sosialisasi politik tetap terlaksana. Merujuk pada hasil penelitian

para ilmuwan, agen atau aktor tampil dalam wujud keluarga, lembaga pendidikan—baik tingkat rendah, menengah, maupun tinggi—, kelompok pergaulan, lingkungan pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik langsung.²³

Terkadang, agen adalah seseorang yang memiliki pengalaman empiris di bidang politik, contohnya pernah terjun dalam aktivitas politik, seperti mengikuti pemilihan anggota legislatif atau menjadi aktivis partai. Dalam proses sosialisasi, individu yang bersangkutan memiliki peran sebagai subjek sekaligus jembatan yang menghubungkan peristiwa politik dengan dirinya sendiri. Jadi, dalam proses tersebut, tidak tertutup kemungkinan agen mengemban dua fungsi, yakni sebagai subjek yang terkena sosialisasi dan sebagai jembatan penghubung. Hal ini khususnya terjadi pada proses sosialisasi yang melibatkan pengalaman empiris.

Oleh karena itu, dengan melihat proses sosialisasi politik, identifikasi dirasa penting untuk menemukan

23 Tentang agen sosialisasi politik dapat dilihat pada Gabriel A. Almond (ed.), *Op. cit.*, hlm. 47 – 49; Mohtar Mas'oe'd dan Colin MacAndrews (eds.), *Op. cit.*, hlm. 35 – 37; Paul Allen Beck dalam Stanley Allen Renshon (ed.), *Op. cit.*, hlm. 115 – 141. Uraian ringkas mengenai agen sosialisasi politik didasarkan pada pendapat Gabriel A. Almond dan Paul Allen Beck di halaman tersebut.

agen yang memiliki andil bagi keberlangsungan sosialisasi politik. Pertimbangannya adalah identifikasi bisa memetakan pihak yang berpotensi menjadi agen sosialisasi sehingga keberhasilan sosialisasi politik lebih terjamin.

Upaya untuk memetakan agen atau aktor sosialisasi politik bisa dinyatakan relevan apabila dikaitkan dengan upaya menciptakan atau memantapkan agar sistem politik dalam keadaan baik, yaitu keadaan dimana mekanisme input-output yang merupakan karakter utama sistem politik dapat berjalan lancar dan stabil. Sistem politik yang relatif baik menunjukkan bahwa sistem mampu merespons aspirasi warga masyarakat sebagai input untuk diolah atau diubah menjadi kebijakan sebagai hasil kinerja atau output dari sistem politik.

Sementara itu, salah satu keberhasilan sosialisasi politik ditandai dengan keajegan aliran input ke dalam sistem politik. Input terdiri dari tuntutan dan dukungan, yang berfungsi layaknya bahan mentah (*raw material*) agar sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan. Sehingga, keberhasilan sosialisasi politik turut andil menciptakan sistem politik yang baik.

Dalam proses menyampaikan materi sosialisasi kepada masyarakat, agen bisa melakukan sendiri atau bersama-sama. Sebagai contoh, jika seseorang

memperoleh pengetahuan politik dari lingkungan pekerjaannya, maka lingkungan ini bisa disebut bekerja sendiri dalam mentransfer pengetahuan politik, asalkan orang tersebut tidak mendapat pengetahuan yang sama dari agen lain. Namun, jika di waktu yang bersamaan, orang tersebut juga memperoleh pengetahuan politik dari media massa misalnya, maka agen dikatakan melakukan sosialisasi secara bersamaan. Patut dicatat, proses sosialisasi umumnya melibatkan lebih dari satu agen sosialisasi, yang artinya sosialisasi cenderung melibatkan banyak agen daripada agen tunggal.

Bekerjanya beberapa agen sosialisasi secara bersamaan bukan merupakan hal yang mustahil. Penyebabnya, karena seseorang tidak hanya hidup dalam satu lingkungan. Pada kurun waktu yang sama, seseorang hidup dalam berbagai lingkungan dan yang bersangkutan bisa menjalin interaksi dan relasi dengan bermacam agen sosialisasi. Misalnya, seseorang berinteraksi dengan keluarganya dan di saat bersamaan ia pun terikat pada lingkungan pergaulannya. Bahkan, dapat pula berinteraksi dengan lingkungan pekerjaannya atau institusi pendidikan seperti sekolah karena ia tengah menempuh pendidikan.

Selain itu, bekerjanya agen sosialisasi secara bersamaan dikarenakan materi, baik berkaitan dengan

politik maupun tidak, tidak berada dalam genggaman seorang agen saja. Contohnya, pengenalan lembaga, struktur, dan mekanisme yang berlangsung dalam sistem politik tidak hanya dimonopoli lembaga pendidikan, materi ini bisa pula dikenalkan oleh media massa. Demikian pula, materi yang tidak berkaitan dengan politik seperti norma pergaulan, tidak dimonopoli keluarga sebagai agen sosialisasi tetapi bisa juga dikenalkan oleh lingkungan pergaulan.

Berkaitan dengan agen sosialisasi politik, tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga merupakan agen yang pertama kali dijumpai oleh mereka yang mengalami sosialisasi. Hal ini karena secara sosiologis, keluarga adalah kelompok sosial pertama yang dihadapi seseorang dalam menjalin interaksi. Ayah, Ibu, dan saudara-saudara kandung atau kerabat dekat lainnya merupakan orang-orang yang pertama kali ditemuinya, dengan mereka pula kontak sosial terjalin untuk pertama kalinya.

Materi yang disosialisasikan melalui keluarga biasanya bersifat umum, dalam arti tidak spesifik bermuatan politik; namun tidak menutup kemungkinan materi itu bisa memengaruhi pandangan atau sikap politik. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan melalui keluarga tidak bisa langsung terlihat hasilnya. Hasilnya akan terlihat kelak ketika yang bersangkutan berusia dewasa dan aktif di

pentas politik. Sebagai gambaran, anak yang tumbuh dalam keluarga yang membiasakannya untuk tidak memaksakan keinginan kepada teman akan tumbuh menjadi pribadi yang cenderung demokratis di pentas politik. Pun sebaliknya, berada di keluarga yang selalu memaksa anak untuk patuh akan membentuk seseorang yang cenderung memaksakan kehendaknya atau otoriter di pentas politik.

Studi yang dilakukan Ojeda dan Hatemi menunjukkan adanya kecenderungan pada anak-anak untuk mengidentifikasi dirinya dengan partai politik ditunjang oleh peran keluarga.²⁴ Peran orang tua ternyata cukup penting dalam mentransfer nilai dan ideologi politik, sehingga anak-anak merasa dekat dengan partai politik tertentu. Berlangsungnya proses transmisi, sebagaimana dinyatakan oleh Ojeda dan Hatemi, ternyata tidak berjalan searah tetapi dua arah. Artinya, anak-anak dalam keluarga tidak saja menerima proses transmisi nilai-nilai dan ideologi dari orang tua tetapi di saat bersamaan juga beradaptasi dengan kondisi dan keinginannya masing-masing, sehingga selalu ada proses modifikasi setelah sosialisasi politik.

24 Ojeda, Christopher and Hatemi, Peter K. "Accounting for the Child in the Transmission of Party Identification", *American Sociological Review*, 2015, 80 (6), hlm. 1150 – 1174.

Kajian lain tentang pentingnya peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik dilakukan oleh Beck dan Jennings. Mereka membuktikan bahwa partisipasi dan orientasi politik anak-anak dilekati efek sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua.²⁵ Dalam artikelnya yang berjudul “*Parents as ‘Middlepersons’ in Political Socialization*”, Beck dan Jennings mengungkapkan bahwa proses sosialisasi politik yang dijumpai oleh orang tua tidak selalu menetap atau bertahan lama. Hasil dari sosialisasi akan selalu berubah seiring proses sosialisasi politik yang dialami seseorang dan perubahan struktur sosial yang melingkupinya. Dengan kata lain, meskipun keluarga sebagai agen berperan penting dalam proses sosialisasi politik, namun tidak menjadikannya sebagai agen tunggal yang berhasil memengaruhi orientasi atau pilihan politik setiap individu.

Adapula Hener, Reiner, dan Steidler yang mengelaborasi peran keluarga dalam proses sosialisasi politik.²⁶ Keluarga berperan besar dalam membentuk

25 Beck, Paul A., and M. Kent Jennings, “Parents as ‘Middlepersons’ in Political Socialization”, *The Journal of Politics*, 1975, Vol. 37 (1), hlm. 83 – 107. DOI: 10.2307/2128892.

26 Hener, Timo, *et. al.*, “Political Socialization in Flux? Linking Family Non-Intactness During Childhood to Adult Civic Engagement”, *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)*, 2016, Vol. 179 (3), hlm. 633 – 656.

keterlibatan anggotanya (anak-anak) bermuara pada apa yang disebut sebagai “*civic engagement*”. Studi ini menjelaskan bahwa keluarga yang tidak harmonis, contohnya perceraian yang berdampak buruk bagi relasi antara orang tua dan anak, ternyata menghambat proses pembentukan kewargaan (*citizenship*), yang bermuara pada rendahnya keterlibatan warga dalam kehidupan sosial dan politik. Jika suatu keluarga tidak harmonis, struktur di dalamnya menjadi pincang sehingga keluarga gagal mengemban fungsi-fungsinya. Situasi ini menyebabkan proses sosialisasi politik mengalami perubahan signifikan.

Berdasarkan kajian tersebut, peran penting keluarga adalah sebagai agen untuk membentuk dan memperkuat karakter anak sekaligus mempertegas peran-peran sosial mereka dalam struktur sosial dan politik. Hal ini membuktikan bahwa proses sosialisasi di keluarga mempunyai peran signifikan untuk membentuk individu ketika berhadapan dengan bermacam proses sosial dan politik.

Selain keluarga, agen sosialisasi politik yang tidak kalah penting adalah sekolah. Sekolah memberi pengetahuan-pengetahuan tertentu yang sering kali tidak diperoleh di lembaga lain. Kurikulum dan peran para guru akan membentuk sikap maupun pandangan

bagi muridnya tentang kehidupan, pengetahuan sosial, ekonomi, dan politik.²⁷

Selain pengetahuan umum, sekolah juga menstransfer nilai, sikap, dan keyakinan politik kepada siswanya. Pelajaran tertentu bisa menambah wawasan tentang ideologi bangsa dan corak sistem politik yang tengah berlangsung. Guru pun dapat membentuk atau memengaruhi orientasi dan sikap-sikap para murid. Sikap, cara, dan gaya guru yang membuka peluang bertanya atau mengemukakan pendapat akan berbeda pengaruhnya dengan guru yang lebih menekankan proses pembelajaran indoktrinasi.

Merujuk pada hasil penelitian Neundorf, Niemi, dan Smets, pendidikan di sekolah ternyata mampu memberikan kompensasi bagi kegagalan sosialisasi politik oleh keluarga.²⁸ Studi tersebut berupaya memberi bukti bahwa pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) di sekolah mampu berkontribusi positif bagi pembentukan orientasi dan sikap politik

27 Langton, Kenneth P., and M. Kent Jennings, "Political Socialization and the High School Civics Curriculum in the United States", *American Political Science Review*, 1968, Vol. 62 (03), hlm. 852 – 867. DOI: 10.2307/1953435.

28 Neundorf, Anja, *et. al.*, "The Compensation Effect of Civic Education on Political Engagement: How Civics Classes Make Up for Missing Parental Socialization", *Political Behavior*, 2016, Vol. 38 (4), hlm. 921 – 949.

para remaja. Dengan demikian, sekolah dianggap bisa melengkapi proses yang dilakukan oleh keluarga. Kegagalan keluarga sebagai agen disinyalir karena lebih banyak menyampaikan materi yang tidak bermuatan dan tidak memberikan pendidikan kewarganegaraan.

Demikian pula dengan kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan pihak sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler adalah salah satu sarana proses sosialisasi.²⁹ Melalui kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pramuka misalnya, seseorang dapat mempelajari cara berorganisasi, kepemimpinan, bekerja sama dalam kelompok, dan sebagainya. Ekstrakurikuler turut membentuk sikap atau keyakinan siswa yang bisa memengaruhi wawasan politiknya.

Selain keluarga dan sekolah, kelompok pergaulan pun memainkan peran penting sebagai agen sosialisasi politik. Adapun yang termasuk dalam lingkup kelompok pergaulan, antara lain kelompok bermain di masa remaja, kelompok persahabatan, atau kelompok sosial lainnya yang ada di sekitar tempat tinggal. Lebih spesifik, keikutsertaan dalam

29 Meski tidak secara langsung memberikan pengaruh, peran *peer group* di sekolah turut berkontribusi meskipun minim. Lihat artikel Nam-Jin Lee, *et. al.*, "Processes of Political Socialization: A Communication Mediation Approach to Youth Civic Engagement", *Communication Research*, 2013, Vol. 40 (5), hlm. 669 – 697.

asosiasi perkumpulan berlatar tradisi, agama, ataupun etnisitas ternyata juga menjadi sarana yang menopang bagi berlangsungnya sosialisasi politik.

Dalam kelompok pergaulan, setiap individu berinteraksi dan menyesuaikan pendapat pribadi dengan pendapat kelompoknya. Jika tidak mampu, maka ia akan tersingkir dan tidak tertutup kemungkinan dikeluarkan dari kelompok. Kelompok pergaulan, sedikit banyak, dapat memaksa anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Tidak berlebihan bila dinyatakan bahwa kelompok pergaulan dapat melakukan sosialisasi dan mentransmisikan kepentingan, nilai, sikap, dan keyakinan yang dianut kelompok kepada para anggotanya.

Selain agen yang telah diulas di atas, ada pula agen sosialisasi yang tampil dalam wujud lingkungan pekerjaan. Relasi yang terjalin dalam lingkungan pekerjaan memberi warna dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang. Hubungan dengan atasan, bawahan, atau rekan sejawat memiliki karakter berbeda dengan relasi yang ada di lingkungan lain. Situasi dan karakteristik yang ada di lingkungan “*white collar*” tentu berbeda dengan situasi dan karakteristik yang ada pada lingkungan “*blue collar*”.

Hal menarik di lingkungan pekerjaan adalah adanya kelompok atau serikat pekerja. Kelompok ini terorganisir, fungsi utamanya memperjuangkan

aspirasi dan kepentingan anggota ketika berhadapan dengan instansi tempat mereka bekerja. Serikat pekerja menjadi tempat yang kondusif untuk melakukan proses pentransferan nilai, norma, sikap atau orientasi politik. Oleh karena itu, lingkungan ini berperan penting dalam proses sosialisasi politik.

Aktivitas yang dilakukan oleh kelompok pekerja tidak jarang bersentuhan dengan politik. Mereka yang menuntut kebijakan untuk kenaikan upah dan memperjuangkan hak-hak pekerja misalnya, tidak sekadar mendesak institusinya tetapi juga melakukan demonstrasi bersama kelompok pekerja lain. Aktivitas semacam ini jelas memberi pengalaman langsung bagi pekerja dan mengindikasikan berlangsungnya proses sosialisasi politik yang intens. Pengalaman tersebut bisa jadi membuat pekerja beralih menjadi aktivis partai politik.

Selain itu, media massa juga merupakan agen sosialisasi politik. Wujudnya dapat berupa media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti radio atau televisi, dan terutama media sosial. Media massa dapat setiap saat menyalurkan beragam informasi ke masyarakat, termasuk yang bermuatan politik. Media sosial, seperti *facebook* dan *twitter* pun bisa dengan cepat membawa informasi berbau politik sekaligus melakukan sosialisasi.

Media massa mampu menghadirkan beragam informasi dalam satu topik yang sama. Hal ini jelas berpengaruh bagi seseorang yang tengah menjalani proses sosialisasi politik. Sebab, informasi yang tersebar bisa saling bertolak-belakang, sehingga orang tersebut dituntut untuk bisa memilah dan memilih informasi yang bermanfaat untuk memperluas cakrawala pengetahuannya.

Selain sebagai agen yang menstransfer materi sosialisasi, media massa juga menjalankan peran “*intermediary*”. Media massa menjadi instrumen perantara untuk mentransfer nilai, norma, sikap, atau orientasi politik sehingga berperan ganda. Dalam menjalankan peran “*intermediary*”, banyak agen yang memanfaatkan media massa sebagai perantara. Sekolah memanfaatkan media massa untuk menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh kepada para siswa. Keluarga pun memakai media sosial—dalam pemahaman yang longgar, media sosial merupakan varian dari media massa—sebagai perantara sosialisasi.

Selain mampu mentransfer banyak informasi sekaligus dalam waktu yang sama, media massa juga memiliki daya jangkau lebih luas dibandingkan agen sosialisasi politik yang lain. Selain itu, media massa juga lebih cepat dalam menyampaikan informasi kepada anggota masyarakat sebagai pihak

yang menjalani sosialisasi politik. Beberapa kajian menengarai bahwa media massa bisa menjadi agen sosialisasi politik yang paling besar pengaruhnya.

Pentingnya peran media massa sebagai agen sosialisasi politik ditunjukkan oleh Garramone dan Atkin. Mereka meneliti media massa seperti berita televisi, koran, radio dan majalah dalam melakukan proses sosialisasi politik.³⁰ Garramone dan Atkin menjelaskan bahwa banyaknya pemberitaan melalui media, terutama televisi, memberikan kontribusi signifikan bagi pengetahuan politik. Tingginya pemberitaan melalui televisi mampu meningkatkan keingintahuan sekaligus hasrat untuk berdiskusi tentang tema-tema politik. Dari kajian ini, bisa dicermati bagaimana media massa mampu menjadi agen sosialisasi politik meski terbatas pada peningkatan pengetahuan politik.

Satu dekade sebelum studi yang dilakukan oleh Garramone dan Atkin, terdapat kajian yang berupaya mengetahui efek yang ditimbulkan dari pemberitaan melalui media terhadap pengetahuan politik, keterlibatan pada isu-isu publik, bahkan perilaku politik lewat media massa terutama surat

30 Garramone, Gina M. and Chareles K. Atkin, "Mass Communication and Political Socialization: Specifying the Effects", *Public Opinion Quarterly*, 1986, 50 (1), hlm. 76 – 86.

kabar. Kajian tersebut dilakukan oleh Chaffee, Ward, dan Tipton.³¹ Kajian ini setidaknya dapat menjadi salah satu pionir dalam studi sosialisasi politik, yang fokus pada efek media dalam proses politik. Chaffee, Ward, dan Tipton mengambil kasus pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1968, khususnya di lima kota negara bagian Wisconsin. Hasilnya—meski berkorelasi moderat—media massa terutama surat kabar sangat membantu proses sosialisasi politik (khususnya, transmisi pengetahuan politik), termasuk ketertarikan terhadap isu-isu publik yang sedang berkembang. Meskipun demikian, kajian ini tidak berhasil membuktikan bahwa media massa turut berperan dalam membentuk perilaku maupun orientasi politik.

Telaah lain yang menelusuri efek media massa terhadap proses sosialisasi politik dilakukan oleh Atkin dan Gantz. Dalam tulisannya yang berjudul “*Television News and Political Socialization*”³², mereka menelisik bagaimana relasi yang terbangun antara media massa, terutama televisi melalui

31 Chaffee, Steven H., *et. al.*, “Mass Communication and Political Socialization”, *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 1970, Vol. 47 (4), hlm. 647 – 666.

32 Atkin, Charles K. and Walter Gantz, “Television News and Political Socialization”, *Public Opinion Quarterly*, 1978, Vol. 42 (2), hlm. 183 – 194.

program-program berita, dengan pengetahuan serta ketertarikan anak-anak terhadap politik. Hasilnya menunjukkan bahwa eksposur program-program berita memberikan peran positif terhadap pengetahuan dan keingintahuan politik dan isu-isu publik. Namun, telaah ini tidak mampu membuktikan bahwa dengan menonton program berita televisi bisa mendorong anak-anak untuk membicarakan politik atau isu-isu sosial secara berkesinambungan. Dengan kata lain, banyaknya eksposur dari media televisi tidak serta-merta mendorong seseorang untuk aktif mendiskusikan tema politik, banyaknya eksposur lebih berkorelasi dengan bertambahnya pengetahuan dan keingintahuan individu tentang politik.

Agen sosialisasi politik lainnya adalah kontak-kontak politik langsung. Maksudnya, melalui sentuhan yang berkaitan langsung dengan politik, disadari atau tidak, seseorang mengalami proses sosialisasi politik. Sebagai contoh, mengikuti pemilihan presiden, kepala daerah, atau anggota legislatif merupakan sosialisasi politik melalui kontak langsung. Demikian pula, menjadi anggota partai politik yang aktif juga merupakan contoh kontak politik langsung. Sebagai aktivis partai, seseorang akan mengalami banyak peristiwa politik, tidak hanya berhadapan dengan aktivis partai lain sebagai lawan politiknya tetapi juga tidak jarang berlawanan dengan sesama anggota

partai. Pengalamannya tersebut membuat seseorang mengalami sosialisasi politik. Hal yang perlu dicatat, pada umumnya proses sosialisasi politik melalui kontak politik langsung lebih banyak dialami oleh individu yang menginjak usia dewasa.

Dari agen-agen yang telah diulas tersebut, sulit untuk ditentukan agen yang paling signifikan melakukan sosialisasi politik. Hal ini disebabkan oleh sasaran sosialisasi berada pada rentang usia yang berbeda-beda. Agen-agen tersebut bisa dipilah berdasarkan individu yang terkena proses sosialisasi politik. Pada umumnya, keluarga, sekolah, dan kelompok pergaulan menyasar anak-anak hingga remaja; sedangkan agen pekerjaan, media massa, dan kontak politik langsung membidik remaja hingga dewasa sebagai targetnya.

Terkait dengan peran agen sosialisasi, muncul pertanyaan menarik; agen manakah yang paling berperan dalam proses sosialisasi politik? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut; sulit untuk menyatakan agen yang satu mempunyai peran lebih menonjol dibandingkan dengan agen yang lain. Kesulitan menjawab pertanyaan tersebut dikarenakan individu yang terkena sosialisasi berada pada rentang usia yang berbeda.

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan di atas beragam. Keluarga dianggap agen yang paling

dominan karena merupakan institusi pertama yang dikenali seseorang, meski materi yang disampaikan lebih banyak di luar politik. Sekolah disinyalir paling berperan dalam mengenalkan nilai, norma, sikap, atau pengetahuan politik karena murid memperoleh pendidikan kewarganegaraan melalui proses pendidikan yang bersifat intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kelompok pergaulan dikatakan lebih berperan dibandingkan dua agen lainnya karena pada umumnya anak-anak hingga remaja cenderung loyal pada kelompoknya. Nilai, norma, dan sikap kelompok diikuti karena khawatir akan disingkirkan dari lingkungan tersebut. Penyebabnya adalah mereka masih dalam proses mencari identitas atau jati diri yang lebih mudah ditemukan dalam kelompok pergaulan.

Selain itu, tempat atau lingkungan dan kurun waktu sosialisasi juga memengaruhi peranan agen. Peran keluarga di pedesaan tentunya berbeda dengan masyarakat perkotaan, demikian pula peran kelompok pergaulan di masyarakat yang masih kental balutan nilai-nilai tradisi dengan masyarakat yang tradisinya mulai memudar. Seiring kemajuan teknologi, peran sekolah pada kurun waktu sepuluh tahun yang lalu juga berbeda dengan peranannya sepuluh tahun yang akan datang.

Kesulitan yang sama juga dihadapi dalam menentukan agen yang paling dominan di antara pekerjaan, media massa, dan kontak politik langsung. Pekerjaan dirasa paling signifikan karena relasi yang spesifik antara pekerjaan sebagai agen sosialisasi dengan individu sebagai sasaran. Spesifikasi yang dimaksud adalah seseorang bergantung pada pekerjaannya sehingga pentransferan materi sosialisasi ditengarai menjadi lebih intens. Media massa disebut lebih dominan karena bisa menjangkau banyak sasaran sosialisasi dalam waktu singkat. Kontak politik langsung pun dikatakan paling berperan karena proses penyampaian materi lebih “direct” dibandingkan agen sosialisasi lainnya, sehingga proses sosialisasi lebih kondusif.

Paparan tersebut menunjukkan adanya kesulitan untuk memperlihatkan agen mana yang dominan dalam melakukan sosialisasi politik. Agen-agen tersebut memiliki keunggulan masing-masing; namun secara ringkas bisa dinyatakan bahwa besar atau kecil peran agen ditentukan beragam faktor terkait tempat, waktu (saat), dan individu yang terkena proses sosialisasi politik.

Paul Allen Beck memaparkan tiga hal yang bisa membantu untuk mengukur besarnya peran agen sosialisasi politik, yaitu “*exposure, communication, dan*

receptivity".³³ Besar kecilnya peran yang dijalankan oleh agen tergantung intensitas dari interaksi sasaran dengan agen sosialisasi, proses komunikasi di antara keduanya, dan derajat penekunan dari sasaran tersebut. Di samping itu, peran agen dapat terlihat dari intensitas transmisi materi sosialisasi yang pada gilirannya bisa memengaruhi sikap, orientasi, dan perilaku sasaran.

Bahasan mengenai agen sosialisasi juga membawa implikasi pada bahasan materi atau isi dari sosialisasi politik. Namun, sebelum membahas materi perlu pula membahas keterkaitannya dengan individu yang menjadi sasaran sosialisasi. Ada materi yang lebih tepat disampaikan kepada individu anak-anak atau remaja; dan ada pula materi yang lebih tepat diberikan kepada individu yang telah berusia matang atau dewasa. Hal ini karena perbedaan usia dapat memengaruhi watak dan perilaku individu. Individu yang berusia anak-anak, sesuai dengan karakternya, tentu akan berperilaku berbeda dengan individu yang menginjak usia dewasa. Terkait dengan hal itu, materi atau isi sosialisasi yang diberikan harus mempertimbangkan usia individu yang terkena sosialisasi.

33 Paul Allen Beck dalam Stanley Allen Renshon (ed.), *Op. cit.*, hlm. 115 - 116.

Sebagaimana diungkap pada uraian sebelumnya, umumnya, individu yang berusia anak-anak lebih sering bersentuhan dengan keluarga sebagai agen sosialisasi. Namun, seiring dengan bertambahnya usia, agen yang melakukan sosialisasi menjadi beragam. Pada saat usia sekolah, agen yang berupa sekolah mulai memainkan peran dalam proses sosialisasi. Dalam kurun waktu yang bersamaan, yang bersangkutan mempunyai teman bermain di lingkungannya sehingga agen yang berupa kelompok pergaulan juga memainkan peran sosialisasi. Demikian seterusnya, dengan bertambahnya usia individu akan memunculkan agen baru dalam proses sosialisasi.

Kemunculan agen baru membuka kemungkinan proses sosialisasi berlangsung semakin intens karena beberapa agen menjalankan peran secara berbarengan. Namun tidak tertutup kemungkinan, kemunculan agen baru dapat menyurutkan peran sosialisasi yang dilakukan agen yang telah ada sebelumnya.

Materi Sosialisasi Politik

Berpijak pada pengertian sosialisasi politik, seperti yang telah dibahas di awal buku ini, yang dimaksud dengan materi sosialisasi bisa merujuk kepada nilai, norma, sikap atau keyakinan politik. Menurut Almond, materi sosialisasi dapat dibedakan

menjadi materi manifes dan laten.³⁴ Materi sosialisasi yang manifes adalah materi yang mempunyai kaitan secara eksplisit dengan masalah-masalah politik atau materi yang bermuatan politik; dan dampak sosialisasi dirasakan secara langsung seketika itu oleh individu yang mengalaminya. Sedangkan materi yang laten adalah materi yang tidak bermuatan politik atau tidak berkaitan langsung dengan masalah-masalah politik, sehingga imbas politisnya baru terasa jika individu yang pernah menerima materi ini terlibat dalam kehidupan politik kelak di kemudian hari. Keterkaitan antara materi sosialisasi politik manifes dan laten dengan metode sosialisasi politik langsung dan tidak langsung akan dibahas detail pada subbab Metode Sosialisasi Politik.

Penjelasan lebih lanjut terkait materi sosialisasi yang manifes dan laten diungkap melalui contoh berikut. Proses sosialisasi politik yang manifes dilukiskan seorang individu yang menempuh pendidikan di sekolah. Dalam proses pendidikan, yang bersangkutan memperoleh materi pembelajaran, misalkan, tentang mekanisme sistem politik yang bercorak demokratis. Melalui proses sosialisasi yang

34 Gabriel A. Almond, "Introduction: A Functional Approach to Comparative Politics", dalam Gabriel A. Almond and James S. Coleman (eds.), *The Politics of Developing Areas* (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1960), hlm. 28.

dilakukan agen sekolah, individu tersebut langsung mengetahui dan memahami sistem politik yang bercorak demokratis. Dengan pengetahuan dan pemahamannya, yang bersangkutan mempunyai sikap dan penilaian tertentu terhadap corak sistem politik yang demokratis. Contoh lain, seorang pekerja menjadi aktivis di organisasi pekerja atau serikat pekerja. Dari aktivitasnya, yang bersangkutan memperoleh pengalaman berorganisasi, melakukan lobi atau demonstrasi memprotes kebijakan yang dikeluarkan perusahaan. Dari pengalaman itu, ia mampu menjalankan organisasi dengan efektif dan mendapat pengetahuan terkait strategi atau taktik untuk mengartikulasikan aspirasi kelompoknya.

Sebaliknya, proses sosialisasi politik yang laten dilukiskan melalui contoh seorang anak yang dididik disiplin, tegas, dan keras. Orang tuanya selalu menekankan pentingnya disiplin dalam waktu belajar, makan, dan tidur. Anak harus patuh dan tidak boleh membantah perintah orang tua, jika aturan yang telah dibuat itu dilanggar maka si anak akan dikenai sanksi. Disadari atau tidak, proses sosialisasi sedang berlangsung di keluarga tersebut. Si anak yang terkena sosialisasi tidak merasakan sentuhan, apalagi pengetahuan tentang politik. Ia hanya memahami bahwa hidup harus dijalani dengan pendisiplinan diri, tegas, bahkan keras. Dampak politik baru akan

muncul jika kelak ia terjun di panggung politik. Kecenderungannya, ia akan menjadi politisi yang kurang demokratis, bahkan otoriter.

Contoh lain, sebagaimana umumnya individu berusia remaja, seorang anak relatif intents berinteraksi dengan kelompok pergaulannya. Kelompok pergaulan ini menekankan pentingnya kebersamaan di antara para anggotanya dan menghormati pendapat teman walaupun sebenarnya tidak setuju. Proses sosialisasi melalui kelompok pergaulan ini menyampaikan materi yang tidak bermuatan politik, remaja yang tergabung dalam kelompok ini tidak merasa ada sentuhan politik dari pengalaman yang diperolehnya. Anggota kelompok hanya memperoleh pengalaman berinteraksi dalam kebersamaan dan saling menghormati. Dampak politik pun tidak dirasakan saat itu juga, dampaknya baru terasa apabila nanti mereka berkecimpung di dunia politik. Dari proses sosialisasi seperti itu, kelak di kemudian hari mereka cenderung menjadi politisi yang demokratis.

Terkait materi sosialisasi politik, pendapat Chilcote layak dicermati. Ia menyatakan:

“.... content may include knowledge, that is, certain dispositions and beliefs about politics. Content also involves attitudes learned through political activity such as partisan attachment, ideology, voting, and

the like. Additionally, content may relate orientations toward authority".³⁵

Chilcote mengisyaratkan bahwa materi sosialisasi politik dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, materi sosialisasi yang berupa pengetahuan, yaitu berkaitan dengan disposisi dan keyakinan politik tertentu. Kedua, materi yang berkenaan dengan sikap-sikap yang dipelajari melalui kegiatan politik seperti menjadi pendukung setia, seperti apa ideologinya, bagaimana mekanisme pemungutan suara, dan yang sejenisnya. Ketiga, materi yang disosialisasikan berorientasi kepada otoritas.

Selain Chilcote, Levine pun membedakan sosialisasi politik menjadi tiga tipe yaitu *cognitive socialization*, *affective socialization*, dan *evaluative socialization*. Lebih terperinci, Levine menjelaskannya sebagai berikut:

"Cognitive socialization refers to how knowledge of the basic structures and rules of politics is acquired. How, for example, does an American become aware of the President, the Congress and the Supreme Court. Affective socialization is the process in which an individual develops feelings of approval or rejection of a political leader, governmental unit, or political

35 Ronald H. Chilcote, *Theories of Comparative Politics: The Search for A Paradigm* (Boulder, Colorado: Westview Press, Inc., 1981), hlm. 232.

system. The way in which an individual's affection is shaped in good or bad terms of the President, or the police, or the bureaucracy, for example, is illustrative of affective socialization. Evaluation socialization refers to the process through which one requires the judgements and opinions about political system on the basis of some moral criteria. An assessment of how an individual decides whether or not government policy should be more concerned with national health problems is an example of evaluation socialization".³⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa *cognitive socialization* berkaitan dengan bagaimana pengetahuan tentang struktur dasar dan kaidah politik mampu diterima seseorang. Contohnya, bagaimana seseorang dapat mengetahui tentang presiden, lembaga legislatif, atau mahkamah agung di negaranya. Sedangkan materi yang berhubungan dengan *affective socialization* adalah proses seseorang yang pernah mendapat sosialisasi politik mampu mengembangkan sikap untuk menyetujui atau menolak objek politik tertentu. Misalnya, setuju atau tidak dengan pemimpin politik, lembaga-lembaga pemerintah, sistem politik atau hasil kebijakan yang telah diputuskan. Terakhir, materi *evaluative socialization* berhubungan dengan proses seseorang yang terpapar sosialisasi politik dapat menerima

36 Herbert M. Levine, *Op. cit.*, hlm. 150.

pertimbangan dan pendapat tertentu tentang sistem politik, atas dasar beberapa kriteria moral.

Pemaparan Levine bisa diilustrasikan sebagai berikut. Materi yang disampaikan dalam penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), mencakup tiga aspek: kognisi, afeksi, dan evaluasi. Materi penataran P4 dinyatakan memiliki aspek kognisi karena memuat pengetahuan politik. Hal ini bisa dicermati melalui pengetahuan dan pemahaman Pancasila sebagai dasar negara yang dimiliki peserta. Materi penataran juga mengandung aspek afeksi karena terdapat materi yang bisa memengaruhi sikap peserta penataran, seperti pembentukan toleransi terhadap perbedaan pendapat dan menghormati keberagaman. Sementara, materi evaluasi ditunjukkan oleh kemampuan peserta yang bisa mengevaluasi kehidupan politik atau sistem politik yang tengah berlangsung, berdasarkan kriteria dalam materi penataran.

Metode Sosialisasi Politik

Bahasan metode dan materi sosialisasi sulit dipisahkan karena metode yang diterapkan dalam melakukan sosialisasi politik mempertimbangkan materi yang akan ditransmisikan. Materi sosialisasi yang dipaparkan Almond mengulas adanya materi sosialisasi manifes dan laten. Terkait dengan metode

sosialisasi politik, Almond pun berpendapat bahwa “... . *Political socialization may take the form of either direct or indirect transmission and learning.*”³⁷

Senada dengan Almond, Dawson mengungkapkan bahwa dalam khazanah literatur ilmu politik terdapat dua bentuk *political learning*, yaitu *direct* (langsung) dan *indirect* (tidak langsung).³⁸ “*Direct political socialization* menunjukkan materi yang ditransmisikan memang spesifik bermuatan politik, sedangkan yang dimaksudkan dengan *indirect political socialization* adalah materi yang disampaikan tidak berkaitan dengan politik. Dawson juga menunjukkan bahwa sosialisasi politik tidak langsung terdiri dari dua tahap. Tahap pertama dibentuk predisposisi yang sifatnya umum dan pada tahap kedua predisposisi tersebut dipindahkan ke objek politik.

Berdasarkan pendapat Almond dan Dawson, pelaksanaan sosialisasi politik dibedakan menjadi dua metode, yaitu langsung dan tidak langsung. Perbedaan di antara keduanya, selain terletak pada bagaimana proses sosialisasi berlangsung juga terletak pada materi sosialisasi. Metode langsung menekankan pada materi atau isi yang bermuatan

37 Gabriel A. Almond (ed.), *Op. cit.*, hlm. 45. Pendapat tersebut dapat pula dilihat pada Mohtar Mas’oed dan Colin Mac Andrews (eds.), *Op. cit.*, hlm. 32.

38 Richard E. Dawson, *et. al.*, *Op. cit.*, hlm. 95 – 96.

politik, sementara tidak langsung materinya tidak bermuatan politik tetapi membawa dampak politis di kemudian hari bagi individu yang terkena sosialisasi.

Dawson menambahkan, sosialisasi politik yang dilakukan dengan metode langsung bisa dipilah menjadi empat jenis, yaitu *imitation* (imitasi), *anticipatory political socialization* (sosialisasi politik antisipatoris), *political education* (edukasi atau pendidikan politik), dan *political experiences* (pengalaman politik).³⁹

1) *Imitation* (imitasi).

Imitasi dapat diartikan sebagai peniruan. Tidak bisa dibantah dalam kehidupannya, seseorang pasti pernah meniru orang lain. Oleh karenanya, imitasi dinyatakan sebagai hal yang lumrah karena sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Imitasi sering dilakukan baik sengaja ataupun tidak, dan yang ditiru umumnya adalah nilai-nilai atau pola-pola tingkah laku orang lain. Dalam konteks ini, orang lain yang ditiru acap kali merujuk pada orang-orang yang lebih tua, orang yang memiliki otoritas, atau tokoh yang dihormati. Contoh sederhananya, dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak, seorang anak

39 Uraian selengkapnya dapat dilihat pada pendapat Richard E. Dawson, *et. al., Ibid.*, hlm. 105 – 112.

mengimitasi nilai-nilai sosial budaya yang melekat pada orang tuanya. Misalnya, anak perempuan suka menirukan untuk menjadi ibu, sedangkan anak laki-laki menjadi ayah. Selain itu, anak yang menghargai pendapat teman sepermainan bisa jadi merupakan hasil peniruan terhadap perilaku orang tua yang menghargai perbedaan pendapat.

Dunia politik juga tidak luput dari proses peniruan. Seseorang sangat mungkin meniru nilai, sikap, atau tingkah laku politik orang tua, guru, pemimpin, ataupun tokoh politik yang dikaguminya. Seorang anak bisa mengidentifikasi dirinya dengan partai politik tertentu karena orang tuanya menjadi anggota, aktivis partai, atau simpatisan partai politik tersebut. Peniruan tersebut disebut dengan *positive imitation*.

Berkebalikan dengan *positive imitation*, ada juga penolakan dalam proses peniruan atau *negative imitation*, yaitu si peniru tidak sepakat dengan nilai, sikap, atau tingkah laku politik yang menempel pada orang yang akan ditiru (seseorang yang dijadikan referensi). Kondisi ini biasanya terjadi pada remaja karena mereka sudah mampu membedakan dan memilih sendiri hal-hal yang ingin diikuti. Misalnya, seorang remaja dari keluarga kelas menengah atau atas dan konservatif bergabung dengan kelompok politik radikal, tindakan itu adalah bentuk peniruan

yang berlawanan dari nilai, sikap, atau tindakan orang tuanya.

Positive dan *negative imitation* dapat muncul di masyarakat mana pun, baik yang masih terbelakang, sedang berkembang, atau yang sudah maju. Peran agen sosialisasi, sebagai pihak yang dijadikan referensi, ternyata penting dalam proses peniruan. Hal ini karena segala atribut dan karakter yang melekat padanya akan dijadikan referensi untuk ditiru atau ditolak, oleh sasaran sosialisasi politik.

2) *Anticipatory political socialization* (sosialisasi politik antisipatoris).

Sosialisasi politik antisipatoris merupakan tahap dari sosialisasi politik yang merujuk pada proses persiapan sebelum seseorang memangku jabatan tertentu. Orang yang ingin menduduki jabatan atau posisi sosial tertentu sering memulainya dengan mengambil oper nilai, sikap ataupun tingkah laku yang berhubungan dengan peran-peran tersebut pada jauh hari sebelum yang bersangkutan benar-benar menduduki jabatan profesi atau posisi sosial tertentu tadi. Beberapa contoh yang cukup gamblang adalah mahasiswa fakultas hukum mulai mengadaptasi tingkah laku dan pola pikir advokat, anak laki-laki lebih senang berperan sebagai “bos” dalam permainannya, dan anak perempuan biasanya akan memerankan ibu.

Aktivis mahasiswa juga sering kali telah membekali diri untuk menduduki jabatan politik. Mereka giat mengikuti aktivitas yang diselenggarakan lembaga kemahasiswaan maupun kegiatan ekstrakurikuler yang berafiliasi dengan partai politik tertentu. Dengan begitu, mereka sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi suatu sosok yang mungkin akan diperankannya nanti dalam masyarakat.

Diakui bahwa proses mempersiapkan diri sebelum memangku jabatan kurang jelas apakah bisa dikategorikan sebagai proses sosialisasi atau bukan. Terlepas dari jelas atau tidak apakah proses mempersiapkan diri memangku jabatan sebagai proses sosialisasi, *anticipatory political socialization* tidak diragukan keberadaannya dan dengan mudah dapat dijumpai di tengah kehidupan masyarakat.

3) *Political education* (edukasi atau pendidikan politik)

Pendidikan politik adalah upaya nyata untuk mentransmisikan nilai, sikap, dan orientasi politik. Kegiatan ini dapat diselenggarakan melalui berbagai macam agen sosialisasi, seperti keluarga, sekolah, partai politik, dan sebagainya. Melalui pendidikan politik, anggota masyarakat diharapkan menyadari hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara. Sekolah, sebagai salah satu agen yang menjalankan

pendidikan politik, dapat menyusun kurikulum yang bisa mengenalkan siswa tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu, sekolah bisa pula menjadi agen sosialisasi politik untuk menjalin persatuan dan kesatuan, menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mengenalkan dan menghayati keanekaragaman masyarakat. Demikian pula halnya dengan pendidikan politik yang dilakukan partai-partai politik melalui kontak-kontak politik langsung, selain mengenalkan hak dan kewajiban warga negara juga dapat memperluas wawasan dan pemahaman ideologi yang dianut.

Jika pada imitasi dan sosialisasi politik antisipatoris, inisiatif dalam menyelenggarakan sosialisasi berada di tangan sasaran sosialisasi, lain dengan pendidikan politik, inisiatif justru muncul dari pihak yang memberikan sosialisasi. Oleh karena itu, dalam pendidikan politik, peran aktif agen dan materi sosialisasi penting. Keberhasilan sosialisasi lebih bergantung pada keaktifan agen sosialisasi. Sebagai contoh, gagalnya seorang guru dalam melakukan pendidikan politik akan berakibat pada gagalnya transmisi materi sosialisasi kepada siswa. Walaupun inisiatif dalam pendidikan politik dilakukan pihak yang mentransfer materi sosialisasi, namun tetap harus diakui bahwa peran pihak penerima juga berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan

politik, meski porsinya kecil. Oleh karena itu dalam pendidikan politik, *receptivity* materi sosialisasi yang ditransmisikan oleh agen tetap dinyatakan memberi andil, walau dalam kadar relatif kecil, dalam proses sosialisasi politik.

4) *Political experiences* (Pengalaman Berpolitik)

Selayaknya pengalaman pada umumnya, pengalaman politik merupakan guru yang baik bagi setiap individu untuk memengaruhi kehidupan di masyarakat. Pengalaman hidup seseorang tentunya tidak sama dengan pengalaman hidup orang lain. Seseorang yang banyak mengenyam asam garam kehidupan, biasanya lebih arif dalam menyikapi dan menanggapi persoalan kehidupan.

Di panggung kehidupan politik pun demikian pula adanya. Orang yang sering terlibat di arena politik tentunya mempunyai pengalaman politik yang banyak dan lengkap dibandingkan dengan orang yang jarang terlibat. Beragam pengalaman politik yang dimiliki, pasti akan memengaruhi sikap atau orientasi seseorang terhadap sistem politik yang berlangsung.

Mereka yang jarang dikecewakan dan tidak pernah mempunyai pengalaman pahit dalam kehidupan politik cenderung akan mendukung sistem politik. Demikian pula sebaliknya, mereka yang sering dikecewakan dan mempunyai pengalaman

pahit cenderung kurang memberikan dukungan terhadap sistem politik. Sebagai contoh, mereka yang aspirasinya selalu dipenuhi oleh sistem politik melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan cenderung akan mendukung sistem politik. Sebaliknya, mereka yang tidak terdaftar menjadi pemilih dalam pemilihan umum atau terkena sanksi tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan umum, cenderung bersikap kurang atau bahkan, tidak mendukung sistem politik.

Sungguhpun demikian, pengalaman politik ada kalanya tumpang tindih dengan pendidikan politik. Perbedaan keduanya terletak pada pihak yang aktif berperan dalam sosialisasi politik; pihak yang memberi atau menerima materi sosialisasi. Apabila dalam pendidikan politik yang memegang kendali inisiatif adalah pemberi, maka pengalaman politik lebih menekankan pada inisiatif penerima sosialisasi. Pengalaman politik memberi ruang yang lebih longgar mengenai kemungkinan seseorang memperoleh hal baru tergantung seberapa jauh tingkat aktivitas penerima. Artinya, semakin aktif seseorang di arena politik, maka akan semakin banyak pula pengalaman politik yang dapat diperoleh.

Pemaparan di atas merupakan pernyataan Dawson tentang sosialisasi politik yang dilakukan secara langsung, yang dilanjutkan dengan pendapatnya

tentang sosialisasi politik tidak langsung. Dawson berpendapat bahwa sebagai suatu proses, sosialisasi politik dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama dibentuk suatu *general predisposition* dan tahap berikutnya *general predisposition* yang ditransfer ke objek-objek politik yang lebih khusus.⁴⁰ Ia pun mengungkapkan bahwa ada tiga macam sosialisasi politik tidak langsung, yaitu *interpersonal transference*, *apprenticeship*, dan *generalization*.⁴¹

1) *Interpersonal transference*.

Dawson menyandarkan pembahasan *interpersonal transference* pada asumsi yang dikemukakan oleh Robert Hess dan Judith Torney. Menurutnya, *interpersonal transference* erat kaitannya dengan persoalan psikokultural. Penerapan *interpersonal transference* sering dipakai untuk menjelaskan perkembangan orientasi individu sebagai pihak yang menerima sosialisasi terhadap keberadaan otoritas. Diasumsikan bahwa orientasi seseorang terhadap otoritas politik berakar pada kontak paling awal yang dijalaninya dengan pemegang otoritas nonpolitik, yaitu orang tua atau guru. Berdasarkan pengalamannya, sebagai seorang anak dalam suatu

40 Richard E. Dawson, *et. al.*, *Ibid.*, hlm. 95.

41 Uraian selengkapnya dapat dilihat pada pendapat Richard E. Dawson, *et. al.*, *Ibid.*, hlm. 99 - 105.

keluarga atau sebagai murid di suatu sekolah, seseorang dapat mengembangkan berbagai ragam hubungan dengan figur-figur yang memegang otoritas.

Berkaitan dengan pengembangan berbagai ragam hubungan tersebut, individu yang bersangkutan dapat menggunakan metode atau pola hubungan yang diterapkan saat berinteraksi dengan orang tuanya pada saat di rumah atau dengan guru pada saat berada di sekolahan. Dari relasi yang demikian, individu-individu tersebut belajar mengembangkan pengalaman dan menerapkannya ketika menghadapi otoritas politik. Individu tersebut akan mentransfer perasaannya kepada para pemegang otoritas, yang sering kali berdasar pada hubungan awal yang terjadi ketika ia membangun relasi dengan otoritas nonpolitik. Secara ringkas, dapat dinyatakan bahwa orientasi individu terhadap otoritas bukan merupakan hal yang statis melainkan terbentuk melalui proses yang berakar pada kontak-kontak dengan pemegang otoritas nonpolitik. Orientasi awal ini sebagai basis bagi terbentuknya orientasi terhadap otoritas politik.

2) *Apprenticeship*

Apprenticeship atau magang mempunyai kaitan cukup erat dengan *interpersonal transference*. Magang, dalam kaitannya dengan *interpersonal transference*, memerlukan proses transfer pengalaman yang

telah dikembangkan dari kehidupan nonpolitik ke kehidupan politik. Berbeda dengan “*interpersonal transference*”, sosialisasi politik melalui magang terjadi lewat proses yang berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh struktur atau pengorganisasian di lingkungan tempat magang.

Dalam hal ini, seseorang akan memperoleh nilai, sikap ataupun pandangan yang ada dan diterapkan oleh organisasi kerja. Nilai, sikap ataupun pandangan ini biasanya ada dan melekat pada organisasi kerja dalam kurun waktu lama sehingga bisa dinyatakan sebagai hal yang bersifat turun-temurun. Misalnya, pada titik ekstrem, lingkungan magang yang memegang nilai disiplin tinggi dan patuh pada atasan (seperti halnya kepatuhan pada organisasi militer) akan mentransmisikan nilai, sikap, dan pandangan yang berbeda dengan lingkungan magang yang tidak begitu ketat menerapkan kedisiplinan. Untuk membedakan *interpersonal tranference* dengan magang, secara sederhana dapat dikatakan bahwa *interpersonal tranference* lebih menekankan pada peran individu sebagai aktor yang terkena sosialisasi, sedangkan *apprenticeship* atau magang lebih banyak bertumpu pada struktur organisasi beserta nilai, sikap, dan pandangan yang ada dan dianut di lingkungan magang. Meskipun demikian, peran dari agen dalam

sosialisasi politik melalui proses magang juga tidak bisa diabaikan sepenuhnya.

Oleh karena itu, dalam konteks magang, aktivitas yang sifatnya nonpolitik dipandang sebagai latihan atau magang sebelum individu yang bersangkutan menjalankan aktivitas politiknya. Dalam hal ini, nilai atau sikap nonpolitik seperti keterbukaan, kedisiplinan, komitmen, dan loyalitas yang diperoleh individu dalam proses magang, pada gilirannya di waktu mendatang, akan memberi warna bagi yang bersangkutan dalam menjalani aktivitas-aktivitas politiknya.

Ringkasnya, melalui proses magang, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, bahkan nilai yang dapat digunakan dalam kehidupannya di pentas politik atau ketika mengambil keputusan politik. Tidak berlebihan bila dinyatakan bahwa magang adalah proses individu untuk menimba pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh, maka akan semakin menguntungkan bagi yang bersangkutan. Banyaknya pengalaman yang dimiliki membuat seseorang mempunyai semacam referensi sebagai basis dan bahan pertimbangan untuk menjalankan peran politik.

3) *Generalization*

Generalization atau generalisasi berkaitan erat dengan proses sosialisasi yang dibahas sebelumnya, yakni *interpersonal transference* atau *apprenticeship* (magang). Namun, dalam *generalization* berlangsung perluasan nilai-nilai sosial terhadap objek politik. Artinya, pandangan yang dimiliki seseorang yang berakar pada nilai-nilai sosial ditanamkan pada seluruh sistem keyakinan yang dimiliki, termasuk keyakinan politik. Nilai, sikap, atau keyakinan dan pandangan yang bersifat umum dan nonpolitik ditanamkan menjadi keyakinan, yang kemudian menjadi basis untuk melakukan penilaian politik. Sehubungan dengan hal itu, patut diperhatikan bahwa proses sosialisasi dalam bentuk *generalization* ini sering mengemukakan asumsi yang menyamaratakan penilaian, mengandung stereotip ataupun stigmatisasi.

Tidak berlebihan bila dinyatakan bahwa proses generalisasi ini membentuk pandangan politik bagi setiap individu. Pandangan politik inilah yang nantinya akan ditanamkan pada seluruh sistem keyakinan yang dimiliki individu. Penanaman pandangan politik ke semua sistem keyakinan merupakan hal yang penting, mengingat beragamnya subkultur di masyarakat. Pandangan politik yang dimiliki oleh suatu kelompok

masyarakat mempunyai *style* atau corak tersendiri berdasarkan budayanya.

Terkait dengan sosialisasi politik tidak langsung, menurut penjabaran Dawson tadi, prosesnya diawali dengan pembentukan *general predipostion* yang kemudian ditransfer ke objek politik. Demikian pula halnya dengan *interpersonal transference, apprenticeship, dan generalization*, proses berlangsungnya diawali dengan pembentukan *general predipostion* yang kemudian ditransfer ke obyek politik. Sehubungan dengan hal itu, tidak berlebihan bila dinyatakan nilai, norma, sikap, atau keyakinan politik yang diserap seseorang dalam proses sosialisasi politik tidak langsung tergantung pada keberhasilan membentuk *general predisposition*.

Uraian sebagaimana dipaparkan tersebut menunjukkan ada bermacam metode atau cara bagi keberlangsungan sosialisasi politik, baik yang dilakukan secara langsung (empat tipe) maupun tidak langsung (tiga tipe). Berkaitan dengan metode atau cara tersebut, dengan berragam variasi proses penyelenggaraannya, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan sebagaimana dikemukakan berikut ini.

Pertama, paparan beragam metode tersebut menunjukkan bahwa proses sosialisasi politik yang dijalani seseorang bukanlah proses sederhana, namun justru beragam dan kompleks. Hal itu tidak lepas dari

faktor-faktor yang memengaruhinya, antara lain agen sebagai pihak yang mentransfer materi sosialisasi, metode atau cara pentransferan materi, dan konten atau isi materi sosialisasi. Meskipun materi sosialisasi yang disampaikan ke masyarakat sama, namun hasilnya bisa berbeda, hal ini tidak mengherankan karena proses penyampaiannya berbeda atau disampaikan oleh agen yang berbeda.

Kedua, metode sosialisasi langsung dan tidak langsung dapat berjalan terpisah (sendiri-sendiri) maupun bersama-sama. Maksudnya, sosialisasi bisa dilakukan tidak hanya dengan satu metode, namun dapat dilakukan dengan mengkombinasikan dengan berbagai metode lain. Kombinasi tersebut sangat mungkin dilakukan karena seorang individu pada waktu yang bersamaan terlibat dalam berbagai sektor kehidupan. Seseorang yang menerima pendidikan politik di sekolah, di saat yang sama—misalnya, pada jam istirahat—juga terlibat dalam proses *interpersonal transference* dengan para guru.

Ketiga, apa pun metode sosialisasi politik yang dilakukan, peran agen sosialisasi sangat penting. Namun demikian, peran agen bukan sepenuhnya sebagai penentu keberhasilan sosialisasi. Peran agen juga tergantung konteks yang melingkupi, di antaranya sosio-kultural, sosio-ekonomi dan sosio-politik. Selain itu, keberhasilan agen juga tergantung

pada individu-individu sebagai pihak yang terkena sosialisasi.

Berdasarkan metode sosialisasi politik tersebut, Dawson menyatakan bahwa sosialisasi politik langsung lebih bisa diterapkan pada upaya penerimaan informasi dan pengetahuan politik, yang berkaitan dengan identifikasi politik. Ia pun menyatakan bahwa sosialisasi politik langsung merupakan teknik yang paling umum dilakukan, melalui teknik ini individu-individu yang mulai menginjak usia dewasa mendapatkan sikap-sikapnya terhadap isu-isu politik yang bersifat khusus. Sementara itu, sosialisasi politik yang dilakukan secara tidak langsung tampak lebih relevan bagi pengembangan cara yang lebih umum bagi individu-individu dengan mengkaitkan dirinya sendiri dengan pentas politik.⁴²

42 Richard E. Dawson, *et. al.*, *Ibid.*, hlm. 113.

Bab III

Sosialisasi, Budaya, dan Sistem Politik

Bab ini mengupas kaitan antara sosialisasi politik dengan budaya politik dan sistem politik. Keterkaitan ini perlu dibahas karena relevansi sosialisasi politik mengarah pada terbentuknya budaya politik di masyarakat. Berbeda dengan relevansi sosialisasi politik yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bab ini mengungkap lebih detail, yakni bahwa sosialisasi relevan untuk membentuk, mengubah, atau memantapkan budaya politik di masyarakat. Relevansi ini terkait pula dengan upaya untuk memelihara atau menjaga keberlangsungan sistem politik. Tidak bisa dipungkiri, berjalannya sistem politik tergantung pada kelancaran mekanisme

input–output, sedangkan mekanisme ini dipengaruhi oleh proses sosialisasi politik di masyarakat.

Diskontinuitas atau ketidaksambungan sosialisasi politik juga akan dibahas pada bab ini. Diskontinuitas sosialisasi bisa terjadi dan akan berdampak pada perubahan corak atau warna budaya politik di masyarakat, juga memengaruhi mekanisme input–output pada sistem politik. Pada gilirannya, diskontinuitas tersebut dapat memunculkan resosialisasi politik di masyarakat sehingga masyarakat bisa mempunyai pandangan atau sikap yang berbeda dengan sebelumnya, misalnya menyangkut institusi politik atau bahkan tentang sistem politik itu sendiri.

Catatan penutup, mengakhiri bab ini menekankan pentingnya seseorang memiliki pengetahuan atau wawasan politik. Hal ini dikarenakan pengetahuan atau wawasan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan, apakah seseorang akan melakukan tindakan politik atau tidak. Sementara itu, pengetahuan atau wawasan tersebut dapat diperoleh melalui sosialisasi politik.

Sosialisasi dan Budaya Politik

Dalam kaitannya dengan budaya politik, Almond mengemukakan bahwa *“Political socialization shapes and transmits a nation’s political culture. Political socialization*

may also maintain a nation's political culture".⁴³ Dari pernyataan Almond tersebut, terungkap bahwa sosialisasi politik dapat membentuk dan mengubah budaya politik yang telah ada di masyarakat dan dapat menjadikan masyarakat tersebut memiliki budaya politik baru. Namun dengan sosialisasi politik pula, budaya politik yang sudah ada di masyarakat tetap dapat dipertahankan atau dipelihara seperti semula.

Adapun yang dimaksud dengan budaya politik secara ringkas adalah orientasi individu dan masyarakat yang meliputi sikap-sikap dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat terhadap suatu sistem politik.⁴⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, berarti budaya politik meliputi nilai, norma, dan sikap tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk orientasi tertentu dari anggota masyarakat terhadap sistem politik. Misalnya, jika nilai, norma, dan sikap yang tumbuh dan berkembang di masyarakat lebih mencerminkan corak demokratis, maka budaya politiknya juga menjadi demokratis. Pun sebaliknya, budaya politik yang otoriter tentu muncul dari nilai,

43 Gabriel A. Almond (ed.), *Op. cit.*, hlm. 45. Dapat pula dilihat pada Mohtar Mas'od dan Colin Mac Andrews (eds.), *Op. cit.*, hlm. 33.

44 Nazaruddin Sjamsuddin *et. al.*, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Karunika–Universitas Terbuka, 1988), hlm. 3.4 – 3.5.

norma, dan sikap bercorak otoriter yang ada dan berkembang di masyarakat.

Budaya politik masyarakat tidak selalu sama. Orientasi masyarakat tradisional berbeda dengan masyarakat sedang berkembang dan masyarakat maju atau modern. Oleh karena itu, Almond memilah tiga pola orientasi masyarakat yang berujung pada perbedaan budaya politik. Tiga pola tersebut yaitu budaya politik parokial, subjek, dan partisipan.⁴⁵

Adapun yang dimaksud dengan masyarakat bertipe budaya politik parokial adalah masyarakat dimana anggotanya mengabaikan, bahkan sama sekali tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa dirinya terlibat dalam kehidupan politik meski sejatinya ada aktivitas politik dalam masyarakat tersebut. Dalam keadaan seperti itu, mereka hampir tidak pernah melakukan aktivitas politik apa pun. Mereka biasanya adalah orang-orang berwawasan sempit dan tinggal di daerah terpencil yang belum sepenuhnya tersentuh oleh sistem politik. Wawasannya tidak luas karena umumnya jauh dari arus informasi, khususnya informasi politik. Tipe masyarakat ini sudah relatif sulit ditemukan karena tidak ada lagi masyarakat yang terisolasi berkat kemajuan teknologi informasi.

45 Gabriel A. Almond (ed.), *Op. cit.*, hlm. 50; atau pada Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews (eds.), *Op. cit.*, hlm. 39.

Masyarakat dengan tipe budaya politik subjek diindikasikan sebagai masyarakat yang anggotanya sudah mengetahui dan menyadari bahwa dirinya terlibat dalam kehidupan politik tetapi mereka pasif dan hanya mematuhi kebijakan yang berlaku. Mereka lebih banyak terlibat pada sisi output sistem politik, keterlibatannya sebatas mematuhi dan melaksanakan kebijakan yang ada. Sementara, aktivitas yang mengarah pada input, seperti berpartisipasi politik dalam menyalurkan tuntutan ataupun dukungan, jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan. Pada umumnya, mereka melakukan aktivitas politik karena ada pihak lain yang mendorong atau memobilisasi. Terbentuknya input yang berwujud tuntutan lebih kental dengan warna mobilisasi dan rekayasa dari pihak yang menguasai sistem politik.

Sikap pasif dalam kehidupan politik biasanya diakibatkan proses sosialisasi politik, terutama yang bersifat langsung, relatif dangkal materinya sekaligus jarang dilakukan. Sikap pasif juga disebabkan oleh masyarakat yang kurang intens dalam menekuni proses sosialisasi. Masyarakat tipe budaya politik subjek masih dapat ditemui di beberapa wilayah negara yang sedang berkembang, namun sulit untuk ditemukan pada negara maju.

Terdapat kemungkinan masyarakat ini sengaja melabelkan dirinya sebagai masyarakat berbudaya

subjek. Dalam sistem politik yang coraknya tidak demokratis, peluang untuk menjadikan suatu masyarakat berbudaya politik subjek relatif besar. Sistem politik otoritarian lebih mengarahkan aktivitas politik warganya sebagai mobilisasi politik. Masyarakat diarahkan sedemikian rupa menjadi warga yang pasif, tanpa peluang mengekspresikan tindakan politiknya secara mandiri.

Apabila ada suatu masyarakat yang anggotanya aktif terlibat dalam kehidupan politik, maka masyarakat tersebut termasuk tipe budaya politik partisipan. Selain mematuhi dan melaksanakan kebijakan yang ada, mereka juga melakukan aktivitas yang mengarah pada terbentuknya input bagi sistem politik. Lebih dari sekadar menyalurkan tuntutan dan dukungan, mereka juga turut memengaruhi pembuatan kebijakan. Masyarakat ini menyadari perlunya melakukan aktivitas politik yang diselenggarakan oleh struktur politik. Contohnya, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan tertentu. Pada umumnya, masyarakat dengan tipe budaya politik partisipan relatif mudah ditemui di negara-negara maju, demokratis, dan mayoritas masyarakatnya sudah mempunyai wawasan politik yang luas.

Aktivitas politik yang dilakukan masyarakat tipe partisipan, umumnya adalah aktivitas mandiri.

Mereka secara sadar melakukan aktivitas politik tanpa paksaan, tekanan, atau mobilisasi. Sistem politik yang demokratis kondusif untuk membentuk masyarakat berbudaya politik partisipan. Oleh karenanya, karakter aktivitas yang dilakukan warga, mandiri atau dimobilisasi, menjadi pembeda utama antara masyarakat berbudaya politik subjek dengan partisipan.

Selain ketiga tipe budaya politik yang telah ditelaah, dimungkinkan pula adanya masyarakat yang mempunyai budaya politik campuran dari tiga tipe budaya tersebut. Dimungkinkan ada masyarakat budaya politik campuran antara tipe parokial dengan subjek, tipe subjek dengan partisipan, ataupun campuran ketiga tipe sekaligus. Adanya masyarakat dengan tipe budaya politik campuran karena masyarakat selalu mengalami perubahan, baik perubahan menuju ke arah kemajuan ataupun mengarah kemunduran.

Pada titik inilah, sosialisasi politik berperan penting karena mampu mengubah budaya politik masyarakat. Artinya, masyarakat yang tadinya tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa dirinya terlibat di panggung politik, melalui sosialisasi diharapkan bisa disadarkan bahwa mereka berada dan terlibat dalam kehidupan politik, serta diberi tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat

yang semula pasif, hanya mematuhi dan melaksanakan kebijakan, diharapkan menjadi aktif dalam kehidupan politik setelah mengalami proses sosialisasi politik. Melalui sosialisasi politik, baik langsung maupun tidak langsung, masyarakat berbudaya politik parokial bisa diubah menjadi masyarakat berbudaya subjek, dan masyarakat berbudaya politik subjek bisa diubah menjadi masyarakat berbudaya partisipan.

Budaya politik yang melekat pada masyarakat dapat dipertahankan atau dipelihara dengan sosialisasi politik. Bagi masyarakat yang sudah menyadari bahwa dirinya terlibat dalam pentas politik dan bersedia meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas politik akan berupaya mempertahankan kondisi tersebut. Sosialisasi politik menjaganya agar kondisi tersebut tidak berubah menjadi pasif. Masyarakat berbudaya politik partisipan tetap mempertahankan label partisipan, masyarakat berbudaya politik subjek walaupun belum mampu mengubah diri menjadi tipe partisipan, paling tidak tetap mempertahankan label sebagai masyarakat berbudaya subjek.

Pertanyaan yang sering muncul terkait ketiga tipe budaya politik tersebut adalah manakah tipe yang paling baik bagi masyarakat, atau lebih tepat bagi sistem politik di masyarakat tersebut. Untuk menjawabnya, relatif sulit karena setiap tipe bisa dinyatakan baik jika cocok dengan kondisi yang

melingkupi sistem politik dan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan sistem politik tersebut. Suatu sistem politik yang kurang demokratis akan memandang masyarakat tipe budaya politik parokial, subjek, ataupun campuran keduanya sebagai yang terbaik. Sementara sistem politik yang membuka peluang anggotanya untuk terlibat dalam pentas politik, cocok dengan budaya politik partisipan.

Ringkasnya, pendapat yang dikemukakan Almond di atas, tanpa memedulikan baik ataupun buruknya suatu tipe budaya politik, menyatakan bahwa sosialisasi politik dapat membentuk, mengubah, dan mempertahankan atau memelihara kebudayaan politik yang melekat pada suatu masyarakat. Masyarakat tipe parokial bisa diubah menjadi tipe subjek maupun partisipan. Jika suatu masyarakat sudah mencapai tipe partisipan, maka budaya politik yang melekat pada masyarakat tersebut tetap dapat dipertahankan melalui sosialisasi politik. Namun, perlu diperhatikan bahwa sosialisasi politik bisa “dimanfaatkan” oleh pihak yang mengendalikan sistem politik. Pengendali sistem politik, dengan tujuan tertentu, bisa memanfaatkan sosialisasi untuk membentuk, misalkan, masyarakat bercorak budaya subjek dengan tujuan relatif mudah memobilisasi masyarakat.

Sosialisasi dan Sistem Politik

Sosialisasi politik tidak bisa dipisahkan dari sistem politik. Sosialisasi politik bisa dinyatakan sebagai “bagian” dari sistem politik, sosialisasi merupakan salah satu fungsi dari sejumlah fungsi input yang dimiliki sistem politik.⁴⁶ Input dipandang sebagai bahan bakar sehingga sistem politik tidak bisa bekerja tanpanya. Input yang diperlukan sistem politik dapat dipilah menjadi dua jenis, yakni input tuntutan dan input dukungan. Kedua jenis input tersebut hanya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.⁴⁷ Sebagai salah satu fungsi input, sosialisasi politik sangat memengaruhi bentuk dan kualitas input yang masuk ke dalam sistem politik.

Di samping itu, sosialisasi politik juga dapat memengaruhi respons masyarakat terhadap kebijakan sebagai output yang dihasilkan sistem politik. Bentuk dan sifat tindakan yang merupakan respons terhadap

46 Fungsi-fungsi yang melekat pada sistem politik dapat dibedakan menjadi fungsi input dan output. Fungsi input terdiri atas fungsi-fungsi: (1) sosialisasi politik dan rekrutmen politik, (2) komunikasi politik, (3) artikulasi kepentingan, dan (4) agregasi kepentingan; sedangkan fungsi output terdiri atas fungsi-fungsi: (1) pembuatan peraturan, (2) penerapan peraturan, dan (3) adjudikasi peraturan. Lihat Gabriel A. Almond and James S Coleman (eds.), *Op. cit.*, hlm. 17; atau pada Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 35.

47 David Easton dalam Haryanto, *Ibid.*, hlm. 28 – 33.

output tidak lepas dari pengaruh sosialisasi politik yang diterima masyarakat. Baik respons tersebut merupakan tindakan menerima maupun menolak kebijakan sebagai output dari sistem politik.

Agar tidak menimbulkan kerancuan, sebelum mengulas lebih jauh keterkaitan antara sosialisasi politik dengan sistem politik, perlu diperjelas makna dari terminologi input dan fungsi input serta output dan fungsi output. Input dan fungsi input memiliki makna yang berbeda. Input mengandung makna masukan berupa *raw material* atau bahan mentah yang akan dikonversi atau diolah menjadi output berupa kebijakan, sementara fungsi input merujuk pada fungsi yang ada pada sistem politik. Bekerjanya fungsi input akan memengaruhi input yang masuk ke sistem politik. Output adalah hasil kerja dari sistem politik berupa kebijakan yang kemudian diimplementasikan ke masyarakat. Sedangkan fungsi output merujuk pada fungsi sistem politik yang memengaruhi pembuatan dan implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, sosialisasi politik bertujuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan politik masyarakat. Paling tidak, mereka semakin menyadari bahwa dirinya, suka atau tidak suka, terlibat dalam aktivitas politik. Lancarnya sosialisasi politik diharapkan membuat masyarakat dengan sadar terlibat di pentas politik berbasiskan

pengetahuan yang dimilikinya, bukan sekadar asal terlibat.

Masyarakat diharap tidak hanya mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara tetapi juga mampu memilahnya. Apabila hak dan kewajiban tercampur aduk, dikhawatirkan akan memantik tindakan politik yang merugikan sistem politik. Dengan sosialisasi politik yang baik dan lancar, bisa membantu masyarakat, misalkan saja menjadi tahu dan paham bahwa dirinya berhak memperoleh perlindungan sebagai warga negara sekaligus tahu dan paham bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan keberhasilan sosialisasi politik, masyarakat bisa segera mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingan yang selama ini belum tersalurkan. Dengan pengetahuan politik yang semakin baik, mereka tidak kesulitan lagi untuk mengartikulasikan tuntutan mereka kepada sistem politik. Mereka menjadi tahu tata cara dan pihak yang dituju untuk menyampaikan tuntutan mereka. Asumsinya, tuntutan yang masuk ke sistem politik akan semakin lancar dan teratur seiring meningkatnya pengetahuan politik masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, sosialisasi politik yang berhasil mendorong munculnya tuntutan secara teratur ke dalam sistem politik akan menjamin

kelangsungan sistem politik itu sendiri. Tuntutan yang teratur masuk ke sistem politik menunjukkan jaminan tersedianya *raw material*. Dengan demikian, sistem politik semakin mantap dan terpelihara karena bahan mentah berperan sebagai energi yang menggerakkan sistem politik. Tidak adanya tuntutan bisa menyebabkan sistem politik mengalami kemacetan karena tidak ada bahan mentah yang diolah atau dikonversikan menjadi output.

Uraian di atas menunjukkan relevansi atau nilai penting sosialisasi politik dalam kaitannya dengan input yang berupa tuntutan. Selain itu, ada juga relevansi antara sosialisasi politik dengan input yang berupa dukungan. Secara sederhana, input berupa dukungan dapat dinyatakan sebagai aktivitas atau tindakan yang mengakui keberadaan sistem politik. Dukungan yang diterjemahkan sebagai pengakuan terhadap keberadaan sistem politik merupakan hal yang penting, karena tanpa pengakuan tersebut tentu tidak ada pihak yang bersedia mematuhi kebijakan.

Tanpa disertai dukungan yang mengakui keberadaan sistem politik, sekalipun ada tuntutan yang masuk, tuntutan tersebut akan menjadi sia-sia. Hal ini karena kebijakan yang dihasilkan sistem politik tidak ada pihak yang mematuhi. Oleh karena itu, kedua jenis input harus hadir dalam sistem politik. Tanpa keduanya, sistem politik akan mengalami

kepincangan atau bahkan kemacetan. Adanya tuntutan harus disertai dukungan; keduanya hanya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan.

Dengan pengetahuan politik yang bertambah berkat sosialisasi politik, masyarakat dapat mengetahui manfaat sistem politik bagi dirinya. Oleh karena itu, diharapkan mereka bersedia mendukung sistem politik dengan cara mematuhi dan melaksanakan kebijakan yang berlaku. Poin penting untuk diperhatikan adalah masyarakat jangan hanya melancarkan aktivitas menuntut melainkan juga harus beraktivitas mendukung keberadaan sistem politik.

Apabila sosialisasi politik mampu meningkatkan pengetahuan politik masyarakat sehingga arus tuntutan dan dukungan lebih lancar dan bisa memelihara dan memantapkan sistem politik, maka kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik dapat memengaruhi besar kecilnya dukungan. Jika kebijakan memenuhi kebutuhan atau kepentingan yang disalurkan menjadi tuntutan, maka otomatis dukungan kepada sistem politik bertambah. Namun sebaliknya, jika kebijakan kurang atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dukungan akan menurun bahkan hilang sama sekali. Merosot atau hilangnya dukungan sudah barang tentu tidak menguntungkan bagi sistem politik. Dukungan kepada sistem politik tetap harus ada dan perlu

dipelihara melalui kebijakan. Dalam hal kebijakan tidak menumbuhkan dukungan, pemeliharaan dukungan bisa dilakukan melalui sosialisasi politik. Poin pentingnya, dukungan kepada sistem politik harus ada meskipun dalam jumlah sedikit.

Sementara di sisi output, sosialisasi politik juga memberikan pengaruh. Sosialisasi politik membuat masyarakat lebih mudah mencerna dan memahami kebijakan. Dalam kondisi ini, mereka bisa cepat dan tepat memutuskan, baik patuh atau menolak kebijakan. Jika mereka menerima kebijakan, berarti mereka akan patuh dengan kesadarannya sendiri dan walaupun mereka menolak kebijakan maka penolakannya juga didasarkan pada pertimbangan matang, bukan sekadar tindakan asal menolak.

Dalam hal mereka menolak penerapan kebijakan, dengan pengetahuan politik yang memadai, masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada sistem politik. Keberatan tersebut dapat diformulasikan dalam bentuk tuntutan baru. Dalam terminologi yang biasa digunakan pada pembahasan sistem politik, tuntutan baru tersebut diartikulasikan ke sistem politik melalui *feedback process* atau proses umpan balik.

Pemaparan di atas mengupas kaitan dan relevansi sosialisasi dengan sistem politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa sosialisasi memiliki peran sentral dalam

sistem politik, keberhasilan suatu sistem politik pun bisa diukur melalui keberhasilan sosialisasi politik. Sosialisasi politik, sebagai salah satu fungsi input, memengaruhi bekerjanya fungsi-fungsi yang lain. Bekerjanya fungsi artikulasi politik sebagai contoh, tergantung pada keberhasilan sosialisasi politik. Sementara itu, bekerjanya fungsi artikulasi kepentingan akan memengaruhi fungsi yang lain, seperti fungsi pembuatan kebijakan. Ringkasnya, sosialisasi politik menduduki posisi sentral dan penting karena berada di awal aktivitas sistem politik dan menjadi penentu bagi bekerjanya fungsi-fungsi yang lain.

Diskontinuitas Sosialisasi Politik

Berlangsungnya proses sosialisasi politik pasti menghadapi berbagai peristiwa, baik mendukung maupun menghambat. Diskontinuitas atau ketidaksambungan sosialisasi politik lebih berkorelasi dengan hambatan yang muncul selama proses sosialisasi. Istilah diskontinuitas menunjukkan putusannya aliran pesan yang disampaikan oleh agen-agen sosialisasi kepada sarannya. Munculnya diskontinuitas bisa disebabkan oleh agen atau sarana yang mentransmisikan materi, objek atau materi yang ditransmisikan, atau dari sasaran sosialisasi politik itu sendiri.

Salah satu bentuk diskontinuitas sosialisasi politik, menurut Dawson dapat terjadi karena generasi muda menolak belajar atau diajari nilai-nilai dasar politik oleh generasi yang lebih tua.⁴⁸ Penolakan itu menunjukkan telah terjadi *generation gap* atau kerenggangan generasi di masyarakat. Dicontohkan oleh Dawson, generasi tua Amerika mempunyai keyakinan bahwa nilai-nilai patriotisme dibutuhkan warga negara untuk bisa memenangkan peperangan. Akan tetapi, pada dekade 1960-an mayoritas generasi mudanya justru menolak. Mereka memprotes dan menolak ikut wajib militer. Diskontinuitas atas nilai-nilai patriotisme tersebut menunjukkan *generation gap* di Amerika.

Sementara itu, diskontinuitas sosialisasi politik dapat pula menampakkan wujudnya dalam bentuk *revolutionary challenge*, yaitu jika sekelompok individu yang berada dalam posisi diperintah menolak belajar ataupun diajari nilai-nilai dasar politik yang dikembangkan oleh kelompok yang sedang memegang kendali pemerintahan. Dawson kembali mencontohkan situasi di Amerika pada dekade 1960-an. Warga kulit hitam yang sudah sejak lama menjadi kelompok yang diperintah, pada dekade itu melancarkan perlawanan sporadis terhadap kelompok

48 Richard E. Dawson, *et. al.*, *Op. cit.*, hlm. 27 – 28.

kulit putih yang memerintah. Mereka menyebarkan slogan-slogan *counter ideology* terhadap ideologi yang telah mapan. Berhasil atau tidaknya aksi tersebut bukanlah perhatian utama Dawson, karena yang ingin ditunjukkan adalah diskontinuitas sosialisasi politiknya.

Imitasi dalam proses sosialisasi, seperti yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, ternyata juga bisa menjadi penyebab diskontinuitas sosialisasi politik. Dalam imitasi, selain berlangsung proses peniruan terhadap pihak-pihak yang dijadikan referensi, juga dimungkinkan berlangsung proses penolakan meniru yang diistilahkan sebagai *negative imitation*. Tidak hanya menolak untuk meniru, *negative imitation* juga sering ditunjukkan dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan referensinya sehingga penerusan nilai-nilai otomatis berhenti. Pada umumnya, mereka yang melakukan penolakan untuk meniru adalah individu-individu berusia remaja. Hal ini dikarenakan mereka masih berada pada usia yang berkecenderungan untuk tampil beda dan masih berupaya mencari jati dirinya.

Diskontinuitas sosialisasi politik juga mungkin disebabkan oleh peristiwa atau pengalaman politik tertentu yang mematrikan kesan mendalam bagi masyarakat, misalnya. Peristiwa seperti perang atau malaise ekonomi akan meninggalkan bekas

mendalam bagi yang mengalaminya. Peristiwa itu dapat menghambat proses sosialisasi politik karena bisa mengubah gambaran tentang politik yang telah diperoleh sebelumnya. Nilai ataupun sikap politik tertentu yang diperoleh melalui, misalnya, keluarga atau sekolah dapat berubah secara drastis karena yang bersangkutan mengalami peristiwa yang mengejutkan dan meninggalkan kesan mendalam. Sebuah keluarga mentransmisikan nilai menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain; nilai ini bisa terhapus ketika ada pemberontakan dan pembunuhan massal, bahkan diikuti tindakan represif sehingga keluarga tersebut mengalami diskontinuitas sosialisasi.

Diskontinuitas bisa memicu resosialisasi politik, karena suatu peristiwa besar mampu mengubah sikap politik masyarakat. Resosialisasi politik adalah perubahan sikap masyarakat secara drastis dalam memandang lembaga politik.⁴⁹ Seperti yang telah dicontohkan, keluarga yang mengalami diskontinuitas sosialisasi akan mengalami resosialisasi. Anggota keluarga melihat lembaga politik tidak seperti sebelumnya, misalnya partai tidak lagi dianggap sebagai lembaga yang bisa menyalurkan aspirasi

49 Gabriel A. Almond (ed.), *Op. cit.*, hlm. 45 – 47; atau pada Mohtar Mas'oeed dan Colin MacAndrews (eds.), *Op. cit.*, hlm. 32 – 34.

melainkan lembaga yang mengatur dan memaksa warga untuk patuh.

Margaret Conway dan Frank Feigert mengungkapkan bahwa diskontinuitas hadir karena seseorang mendapat sosialisasi yang salah atau *incorrectly socialized*⁵⁰, yaitu materi yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan kondisi aktual sistem politik sehingga membuatnya kebingungan. Hal seperti ini akan menciptakan ketidaksambungan sosialisasi yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kurang atau tidak maksimalnya fungsi sosialisasi politik.

Diskontinuitas sosialisasi juga bisa disebabkan agen yang berperan melakukan sosialisasi. Agen sebagai penyebab diskontinuitas apabila beberapa agen melakukan sosialisasi di waktu bersamaan dengan materi yang sama namun masing-masing memberikan pesan berbeda. Kondisi ini tentu membingungkan, terlebih jika pesan mengenai materi itu tidak hanya berbeda tetapi juga bertentangan satu dengan yang lain.

Dampak lanjutan dari perbedaan pesan tadi adalah memunculkan interpretasi yang berlainan. Materi biasanya diinterpretasikan berdasar pada

50 M. Margaret Conway and Frank B. Feigert, *Political Analysis: An Introduction* (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1972). hlm. 104 – 105.

pesan agen, terutama yang paling intens dalam proses sosialisasi. Selain itu, perbedaan pesan juga membuat sasaran meragukan kredibilitas agen, dan kepercayaan mereka terhadap agen tidak tertutup kemungkinan cenderung mengalami penurunan.

Perilaku agen yang kadang tidak konsisten dengan yang disampaikan ke masyarakat juga menyebabkan diskontinuitas. Sebagai contoh, melalui agen keluarga, orang tua menyampaikan nilai demokrasi seperti menghargai perbedaan pendapat, namun mereka terkadang memaksakan kehendak dan pendapatnya. Inkonsistensi ini membingungkan sasaran sosialisasi dan menyebabkan kepercayaan pada agen menurun karena ia tidak memegang teguh, bahkan mengingkari pesannya sendiri. Akibatnya, individu sebagai sasaran sosialisasi bisa saja mengacuhkan pesan agen dan melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan pesan-pesan tersebut.

Apa pun penyebab diskontinuitas sosialisasi politik, yang perlu diperhatikan adalah upaya pencegahan atau paling tidak meminimalisir kemunculannya. Hal ini harus dilakukan karena diskontinuitas yang sering terjadi akan mengganggu mekanisme input-output sistem politik. Input menjadi tidak lancar dan tidak teratur, tuntutan dikhawatirkan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya. Demikian pula pada sisi output, respons masyarakat terhadap

kebijakan akan berkurang sehingga berpengaruh pada implementasi. Walaupun respons tetap muncul, dikhawatirkan respons tersebut tidak berdasarkan pertimbangan yang matang.

Upaya untuk mencegah atau meminimalkan diskontinuitas sosialisasi politik bisa dilakukan dengan memilih agen yang paling tepat. Penilaian apakah suatu agen tepat atau tidak dalam mentransmisikan materi tertentu bukan merupakan pekerjaan mudah. Basis penentuan agen yang paling tepat pasti berbeda antara satu kasus dengan lainnya. Penyebabnya adalah sasaran sosialisasi mempunyai karakter yang berbeda-beda karena pengaruh tradisi atau kondisi sosial ekonominya.

Kesulitan untuk menetapkan agen yang paling tepat juga berkaitan dengan perjalanan waktu yang membawa perubahan di masyarakat. Jika pada kurun waktu tertentu agen yang dipilih sudah dirasa cocok, belum tentu di masa selanjutnya tetap demikian. Hal ini sangat mungkin terjadi karena perjalanan waktu dapat mengubah kondisi yang ada di masyarakat.

Salah satu upaya pencegahan terjadinya diskontinuitas sosialisasi politik bisa dilakukan dengan cara tidak menentukan salah satu agen yang dipandang paling tepat melakukan fungsi sosialisasi. Upaya pencegahan justru dilakukan dengan cara mengaktifkan semua agen sosialisasi yang ada. Hal

ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya salah satu agen dalam menyampaikan pesan. Peran agen yang gagal pun bisa segera diambil alih oleh agen lainnya agar pesan tidak terputus. Cara ini bisa dilakukan dengan syarat semua agen menggunakan bahasa yang sama agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan untuk materi yang sama. Hal ini dapat terwujud apabila semua agen saling berkomunikasi terus-menerus untuk menghindari interpretasi ganda yang mengakibatkan diskontinuitas sosialisasi politik.

Hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi diskontinuitas adalah adanya konsistensi. Konsistensi antara pesan yang disampaikan dengan perilaku agen sehari-hari perlu pula diperhatikan. Apabila tidak ada konsistensi memungkinkan ketidakpercayaan pihak yang terkena sosialisasi yang pada gilirannya bisa menghadirkan diskontinuitas sosialisasi politik. Konsistensi, selain menghindari diskontinuitas sosialisasi, juga diharapkan bisa lebih memantapkan generasi yang menerima nilai, sikap, ataupun keyakinan tadi mengambil alih sebagai miliknya.

Berbagai upaya pencegahan diskontinuitas dapat diterapkan berbarengan guna mendapat hasil terbaik, walaupun praktiknya tidak mudah. Upaya-upaya tersebut pun membutuhkan perhatian dari sistem politik. Kehendak politik dari sistem politik memegang peran penting untuk menghindari diskontinuitas.

Sistem politik, sebagai misal, dapat berinisiatif menetapkan langkah-langkah tertentu agar agen-agen sosialisasi bersedia saling berkomunikasi untuk menyesuaikan diri guna memperoleh bahasa yang sama sehingga kemungkinan interpretasi ganda atas materi yang disampaikan tidak lagi muncul. Tidak adanya interpretasi ganda bisa menghindari diskontinuitas sosialisasi politik.

Catatan Penutup

Adalah hak seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan politik. Realitanya, ada beberapa orang yang aktif terlibat dalam kehidupan politik, namun di ujung lainnya ada pula yang tidak melakukannya. Mereka melakukan atau tidak melakukan tindakan politik dilandasi oleh alasan yang cukup kuat sebagai bahan pertimbangan; namun tidak sedikit pula yang melakukan atau tidak melakukan tindakan politik tanpa dilandasi pertimbangan yang kuat dan masuk akal.

Apabila mereka melakukan atau tidak melakukan tindakan politik tanpa dilandasi kesadaran dan pengetahuan yang memadai, maka hal tersebut kurang menguntungkan bagi sistem politik. Apabila mereka melakukan tindakan politik, kemungkinan besar input yang masuk ke dalam sistem politik belum mencerminkan aspirasi atau kepentingan

masyarakat yang senyatanya. Demikian pula pada sisi output, tindakan politik yang mereka pilih tidak mencerminkan respons yang sesungguhnya terhadap kebijakan.

Demikian pula, apabila mereka tidak melakukan tindakan politik bukan atas dasar pertimbangan pengetahuan yang dimiliki, maka hal tersebut juga merugikan sistem politik. Sistem politik akan kesulitan untuk merespons perilaku tidak melakukan tindakan politik. Selain arus input yang masuk ke dalam sistem politik menjadi tersendat, pada sisi output juga bisa terhambat.

Berbeda dengan keputusan yang dipilih berdasarkan kesadaran dan pertimbangan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, hal tersebut tidak akan mengganggu berputarnya sistem politik. Seseorang akan mampu menjelaskan alasannya untuk mengajukan tuntutan ataupun dukungan terhadap sistem politik. Ia pun dengan mudah mengetahui jalur dan cara yang harus dilakukan untuk menyampaikan tuntutan atau dukungannya. Pada sisi output, ia dapat merespons kebijakan sistem politik dengan lebih rasional. Responsnya pun, baik setuju atau menolak kebijakan, lebih mudah diantisipasi oleh sistem politik. Kondisi ini jelas berdampak positif bagi sistem politik.

Demikian pula halnya apabila mereka tidak melakukan tindakan politik tetapi dilandasi pertimbangan yang didasarkan pada pengetahuannya, hal tersebut juga tidak merugikan sistem politik. Tidak melakukan tindakan politik berlandaskan pertimbangan matang dan rasional dapat direspons oleh sistem politik sebagai input dukungan yang berkurang. Adanya argumentasi yang jelas terkait tidak mengambil tindakan politik menjadikan sistem politik lebih gampang merespons dan mengambil tindakan antisipatif guna mencegah gangguan di arena kehidupan politik.

Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan atau wawasan politik seseorang. Pengetahuan politik yang dijadikan dasar pertimbangan untuk memilih akan bertindak atau tidak akan bertindak dapat diperoleh melalui sosialisasi politik. Setiap individu, sadar atau tidak sadar, memang terlibat dalam proses sosialisasi politik, hanya saja kadar keterlibatan itu yang membedakan antara individu satu dengan lainnya. Perbedaan intensitas keterlibatan pun memengaruhi kualitas pengetahuan seseorang.

Ringkasnya, dalam kehidupan bermasyarakat, dengan sistem politik di dalamnya, diperlukan fungsi sosialisasi politik. Lancar atau tersendatnya fungsi tersebut akan memengaruhi gerak roda sistem

politik. Corak sosialisasi politik di masyarakat atau negara demokratis tentu berbeda dengan yang tidak demokratis. Perbedaan pun tidak hanya tentang materi sosialisasi tetapi juga agen dan metode yang diterapkan.

Daftar Pustaka

- Ala, Andre Bayo. 1982. *Majalah Mahasiswa*, Vol. 32, Tahun VI, November 1982.
- Alfian. 1978. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Allen Beck, Paul. 1977. *Handbook of Political Socialization*. The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
- Allen Beck, Paul and M. Kent Jennings. 1975. "Parents as 'Middlepersons' in Political Socialization". *The Journal of Politics*, Vol. 37 (1), 1975.
- Almond, Gabriel A. 1974. *Comparative Politics Today: A World View*. Boston: Little, Brown and Company.
- Almond, Gabriel A. and James S. Coleman (eds.). 1960. *The Politics of Developing Areas*. Princeton, N. J: Princeton University Press.
- Atkin, Charles K. and Walter Gantz. 1978. "Television News and Political Socialization". *Socialization:*

Specifying the Effects *Public Opinion Quarterly*,
Vol. 42 (2), 1978.

Blank, Robert H. 1980. *Political Parties: An Introduction*.
Englewood, Cliffs, N. J: Prentice-Hall.

Chaffee, Steven H. *et. al.* 1970. "Mass Communication
and Political Socialization". *Journalism & Mass
Communication Quarterly*, Vol. 47 (4), 1970.

Chilcote, Ronald H. 1981. *Theories of Comparative
Politics: The Search for A Paradigm*. Boulder,
Colorado: Westview Press, Inc. Coleman, James
S. (ed.). 1965. *Education and Political Development*.
Princeton: Princeton University Press.

Conway, M. Margaret and Frank B. Feigert. 1972.
Political Analysis: An Introduction. Boston: Allyn
and Bacon.

Dawson, Richard E. *et. al.* 1977. *An Analitic Study
Political Socialization*. Boston: Little, Brown and
Company.

Fuller, John Scott and Jerry Jacobs. 1973. *Introduction
to Sociology*. The Free Press, A Division of
Macmillan Publishing Co., Inc.

Garramore, Gina M. and Charles K. Atkin. 1986.
"Mass Communication and Political". *Public
Opinion Quarterly*, Vol. 50 (1), 1986.

Haryanto. 1982. *Sistem Politik: Suatu Pengantar*.
Yogyakarta: Liberty.

- Hener, Timo, *et. al.* 2016. "Political Socialization in Flux? Linking Family Non-Intactness During Childhood to Adult Civic Engagement". *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistic in Society)*, Vol. 179 (3), June 2016.
- Inkeles, Alex. 1969. *Handbook of Socialization, Theory and Research*. Chicago: Rnd Macmillan & Company.
- Irish, Marian D. and Elke Frank. 1978. *Introduction to Comparative Politics*. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc.
- Kavanagh, Dennis. 1983. *Political Science and Political Behavior*. London: George Alen & Unwin Ltd.
- Langton, Kenneth P. 1969. *Political Socialization*. London: Oxford University Press.
- Langton, Kenneth P. and M. Kent Jennings. 1968. "Political Socialization and the High School Civics Curriculum in the United States". *American Political Science Review*, Vol. 62 (03), 1968.
- Levine, Herbert M. 1982. *Political Issues Debated, An Introduction to Politics*. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc.
- Mas'ood, Mohtar dan Colin Mac Andrews (eds.). 1978. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Lee, N.-J., Shah, D. V., & McLeod, J. M. (2013). Processes of political socialization: A communication mediation approach to youth civic engagement. *Communication Research*, Vol. 40 (5) pp. 669 - 697. <https://doi.org/10.1177/0093650212436712>
- Neundorf, A., Niemi, R. and K. Smets. (2016). The Compensation Effect of Civic Education: How School Education Makes Up for Missing Parental Political Socialisation. *Political Behavior*, 38(4) pp. 921-949.
- Ojeda, Christopher and Peter K. Hatemi. 2015. "Accounting for the Child in the Transmission of Party Identification". *American Sociological Review*, Vol. 80 (6), 2015.
- Renshon, Stanley Allen, ed. 1977. *Handbook of Political Socialization*. The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
- Rocher, Guy. 1972. *A General Introduction to Sociology: A Theoretical Perspective*. Macmilan Company of Canada Limited.
- Rosamond. 2002. *Politics: An Introduction*. London and New York: Routledge.
- Sigel, Roberta. 1965. "Assumptions about the Learning of Political Values". *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 361, September 1965.

Sills, David L., ed. *International Encyclopedia of the Social Science*, Vol. 14. The Macmillan Company & The Free Press. 1968.

Stacey, Barrie. 1978. *Political Socialization in Western Society*. London: Edward Arnold (Publishers) Ltd.

Sjamsuddin, Nazaruddin, *et. al.* 1988. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Karunika–Universitas Terbuka.

Indeks

A

- affective socialization 56, 57
- agen iv, 3, 16, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 62, 63, 64, 65, 69, 73, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 101
- aktivitas politik iv, 14, 22, 33, 78, 79, 80, 81, 82, 85
- aktor 25, 32, 33, 34, 69
- anak 3, 6, 11, 20, 21, 22, 30, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 60, 61, 62, 67
- apprenticeship 67, 69, 71, 72

B

- behavioralisme 29
- berkembang 9, 12, 29, 46, 62, 77, 78, 79
- birokrasi 30
- budaya politik iv, 7, 13, 14, 18, 19, 30, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83

C

- cognitive socialization 56, 57
- communication 50, 106

D

- demokrasi ii, 4, 95
- dewasa 4, 11, 20, 21, 22, 36, 48, 51, 74
- diskontinuitas iv, 76, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

E

- evaluative socialization 56, 57
- exposure 50

G

- generalization 67, 71, 72
- generasi 11, 13, 14, 91, 97
- generation gap 91

I

- ideologi 28, 37, 40, 64, 92
- imitasi 60, 64, 92

incorrectly socialized 94
individu 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 28, 29, 32, 33,
38, 39, 42, 47, 48, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 60,
65, 67, 68, 69, 70, 71,
73, 74, 77, 91, 92, 95,
100
institusi 16, 27, 28, 29, 30,
35, 49, 76
interaksi 6, 24, 25, 27, 32,
35, 36, 51
intermediary 44
interpersonal transference
67, 68, 69, 71, 72, 73

K

kebijakan 3, 6, 21, 22, 34,
43, 54, 57, 66, 79, 80,
82, 84, 85, 87, 88, 89,
90, 96, 99
kekuasaan 27, 28
kelompok iii, iv, 21, 33, 36,
41, 42, 43, 48, 49, 52,
55, 61, 71, 80, 91
keluarga 6, 21, 27, 33, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 48,
49, 52, 54, 61, 63, 68,
93, 95
konsep iv, 6, 7, 8, 26

L

lembaga politik 3, 21, 22, 93

M

masyarakat iv, 1, 3, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
19, 30, 34, 43, 44, 49,
60, 62, 63, 64, 65, 71,
72, 73, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 88, 89, 91, 92,
93, 95, 96, 99, 101
materi iv, 23, 24, 25, 26, 31,
32, 34, 35, 36, 41, 44,
49, 50, 51, 52, 53, 55,
56, 57, 58, 59, 64, 65,
66, 73, 90, 94, 96, 97,
98, 101
media massa 3, 5, 33, 35, 36,
43, 44, 45, 46, 48, 50
metode iv, 7, 26, 29, 31, 53,
58, 59, 60, 68, 72, 73,
74, 101
modern 9, 12, 78

N

nasionalisme 17
negative imitation 61, 62, 92
nilai 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 18, 19, 20, 30, 32,
37, 40, 42, 43, 44, 49,
52, 60, 61, 62, 63, 69,
70, 71, 72, 77, 87, 91,
92, 93, 95, 97

O

organisasi 4, 54, 69
otoritas 14, 21, 56, 60, 67,

68
otoriter 37, 55, 77, 78

P

pandangan politik 5, 71
partai politik ii, 3, 4, 37, 43,
47, 61, 63, 64, 80
partisipasi 7, 19, 38
pemerintah 4, 17, 57
pemilihan umum 4, 66
pendidikan 2, 5, 30, 33, 35,
36, 40, 41, 49, 53, 60,
63, 64, 65, 66, 73, 112
Pendidikan politik 63
Pengalaman Berpolitik 65
pengetahuan 2, 3, 5, 6, 9, 10,
12, 14, 18, 19, 21, 22,
27, 35, 39, 40, 45, 46,
47, 49, 54, 56, 57, 58,
70, 74, 76, 85, 86, 88,
89, 98, 99, 100
pengetahuan politik 2, 3, 6,
35, 45, 46, 49, 58, 74,
85, 86, 88, 89
peran politik 70
perilaku iii, 8, 12, 13, 14, 18,
20, 25, 28, 29, 30, 42,
45, 46, 51, 61, 97, 99
perilaku pemilih 29
perilaku politik iii, 8, 13, 29,
30, 45
positive imitation 61

R

receptivity 51, 65
relasi 7, 21, 27, 35, 39, 42,

46, 50, 68
relevansi 1, 2, 27, 75, 87, 89
remaja 20, 21, 22, 41, 48,
49, 51, 55, 61, 92

S

sasaran sosialisasi 21, 22,
23, 24, 26, 48, 50, 51,
62, 64, 90, 95, 96
sekolah 2, 3, 21, 35, 39, 40,
41, 48, 49, 52, 53, 54,
63, 64, 68, 73, 93
sikap politik 27, 36, 40, 93
sistem politik iv, 1, 6, 7, 14,
15, 17, 18, 19, 26, 28,
29, 30, 32, 34, 36, 40,
53, 54, 57, 58, 65, 66,
75, 76, 77, 78, 79, 80,
82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 94, 95, 97,
98, 99, 100

SOSIALISASI i, iii

sosialisasi politik iii, iv, 1, 2,
6, 7, 8, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34,
36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60,
62, 64, 65, 66, 67, 69,
70, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 79, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96,

97, 98, 100, 101
Sosialisasi politik antisipato-
ris 62
struktur 7, 36, 38, 39, 57,
69, 80

T

teori 7
tindakan politik iii, 16, 76,
86, 98, 99, 100
tradisional 9, 12, 78
transmisi 37, 46, 51

W

warga negara 4, 7, 14, 15,
63, 64, 81, 86, 91
wawasan politik 4, 19, 76,
80, 100

Tentang Penulis

Haryanto

Penulis adalah Staff Pengajar di Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL), Universitas Gadjah Mada (UGM). Pria kelahiran 6 Juli 1954 ini menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, Purworejo. Ia menempuh program pendidikan S-1 dan S-3 di UGM sedangkan program S-2 di *Ateneo de Manilla University, Philippines*. Sepanjang pengalamannya di bidang akademik dan penelitian ia pernah menulis buku berjudul; *Politik Kain Timur “Instrumen Meraih Kekuasaan”*; *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*.



Buku ini didedikasikan untuk menyajikan telaah detail mengenai konsep sosialisasi politik. Sosialisasi politik sebagai salah satu fungsi yang melekat pada sistem politik, diharapkan bisa menjelaskan beragam alasan yang mendasari orang atau kelompok untuk terlibat dalam politik. Pengertian sosialisasi politik dan relevansinya bagi kehidupan politik dipaparkan dalam buku ini, yang dilanjutkan dengan ulasan terkaitan sosialisasi politik dengan terbentuknya budaya politik yang ada di masyarakat. Karena, tak bisa dipungkiri bahwa hal itu mempengaruhi keberlangsungan mekanisme sistem politik. Peran penting agen, materi, dan metode yang diterapkan dalam proses sosialisasi dijabarkan pula dalam buku ini demi memudahkan pembaca memahami alur sosialisasi politik. Serta mengulas pula kemungkinan terjadinya diskontinuitas atau ketidaksinambungan proses sosialisasi politik itu sendiri.

Relevansi sosialisasi politik mengarah pada terbentuknya budaya politik di masyarakat, sehingga buku ini berupaya mengupas kaitan antara kedua hal itu dengan sistem politik karena sosialisasi relevan untuk membentuk, mengubah, atau memantapkan budaya politik di masyarakat. Salah satu penyebab berubahnya warna budaya politik di masyarakat adalah adanya diskontinuitas sosialisasi. Hal itu menarik untuk dicermati dalam buku ini, karena diskontinuitas bisa memantik resosialisasi di masyarakat.



ISBN 978-602-60933-7-0



9 786026 093370 >